

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021 - 2026**



**DISUSUN TAHUN 2023**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran  
S I D O A R J O - 61252  
Telp (031) 8963184, 8946551 Fax (031) 8946551**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEBERSIHAN**

Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran Sidoarjo  
Telepon. (031) 8963184

Email : [dlhk.sidoarjokab@gmail.com](mailto:dlhk.sidoarjokab@gmail.com) Website : [dlhk.sidoarjokab.go.id](http://dlhk.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 188/3447/438.5.11/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo serta adanya perubahan Peraturan Bupati terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Tim Penyusun Review Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### 15. Keputusan Menteri .....



15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tim Penyusun Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 .
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama, tertuang dalam lampiran keputusan ini.

**KETIGA** .....

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
  - b. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Review Renstra;
  - d. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Review Renstra ;
  - e. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renstra ;
  - f. Menyusun Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 13 Desember 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. M. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM  
NIP. 197012111991011001

**Dr. MOH. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701211 199101 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 188/3447/438.5.11/2022  
TANGGAL : 13 Desember 2022

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021-2026**

- 1) Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 2) Wakil : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 3) Koordinator :
  1. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran
  2. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  3. Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
  4. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan
- 4) Anggota :
  1. Sub Koordinator Pengawasan Lingkungan Hidup
  2. Sub Koordinator Pembinaan dan Kemitraan
  3. Sub Koordinator Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum
  4. Sub Koordinator Pengelolaan B3 dan Limbah B3
  5. Sub Koordinator Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak
  6. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan
  7. Sub Koordinator Pertamanan dan Kebersihan
  8. Sub Koordinator Keindahan dan Dekorasi
  9. Sub Koordinator Pendataan, Pengendalian dan Pelayanan
  10. Sub Koordinator Angkutan Sampah
  11. Sub Koordinator Pelayanan Pengolahan Sampah
  12. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah
  13. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
  14. Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
  15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  16. Sub Koordinator Keuangan
  17. Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan
  18. Pengelola Bahan Perencanaan
  19. Pengelola Data pada Bidang dan UPTD

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 13 Desember 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. M. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM

NIP. 197012111991011001

**Dr. MOH. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701211 199101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEBERSIHAN**

Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran Sidoarjo  
Telepon. (031) 8963184

Email : [dlhk.sidoarjokab@gmail.com](mailto:dlhk.sidoarjokab@gmail.com) Website : [dlhk.sidoarjokab.go.id](http://dlhk.sidoarjokab.go.id)

**BERITA ACARA**

**HASIL PERUBAHAN RENSTRA PD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

**Nomor : 050 / 847 / 438.5.11 / 2023**

Pada hari ini Jumat tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2023, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/3447/438.5.11/2022 , Tanggal 13 Desember 2022 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut :

**I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD**

**Uraian Tujuan , Sasaran dan Indikator Sebelum Reviu**

<b>TUJUAN (Sebelum Perubahan)</b>	<b>TUJUAN (Setelah Perubahan)</b>	<b>Keterangan</b>
Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Tetap
Indikator : a. Indeks Kualitas Air b. Indeks Kualitas Udara c. Indeks Kualitas Lahan	Indikator : a. Indeks Kualitas Air b. Indeks Kualitas Udara c. Indeks Kualitas Lahan	Tetap
<b>SASARAN (Sebelum Perubahan)</b>	<b>SASARAN (Setelah Perubahan)</b>	
Sasaran 1 Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	SASARAN 1 Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	Tetap
Indikator Kinerja : a. Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD b. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman,Perdagangan dan Perindustrian), untuk Parameter SO <sub>2</sub> c. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman,Perdagangan dan Perindustrian), untuk Parameter NO <sub>2</sub>	Indikator Kinerja : a. Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD b. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman,Perdagangan dan Perindustrian), untuk Parameter SO <sub>2</sub> c. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman,Perdagangan dan Perindustrian), untuk Parameter NO <sub>2</sub>	Tetap

Sasaran 2 Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	Sasaran 2 Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	Tetap
Indikator Kinerja: a. Persentase sampah yang terkelola b. Persentase luasan RTH yang terkelola	Indikator Kinerja: a. Persentase sampah yang terkelola b. Persentase luasan RTH yang terkelola	Tetap
-	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Tambahan Sasaran baru
-	Indikator Kinerja 1. Nilai SAKIP 2. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) 3. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baru

## II. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Indikator Kinerja Tujuan : a. Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks Kualitas Air merupakan hasil penjumlahan nilai status mutu air pada tahun berjalan	Perhitungan status mutu air tersebut dilihat dari nilai parameter TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform Air Badan Air pada tahun berjalan
b. Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks Kualitas Udara = $100 - \{50/0,9 \times IPU - 0,1\}$	Nilai Indeks Kualitas Udara merupakan hasil rerata IEU SO <sub>2</sub> dan IEU NO <sub>2</sub> yang kemudian dikonversikan menjadi Indeks Pencemaran Udara (IPU)
c. Indeks Kualitas Lahan	Nilai Indeks Kualitas Lahan = $100 - (84,3 - (\text{Tutupan Lahan} \times 100) \times (50 / 54,3))$	Luas Tutupan Lahan merupakan Luas yang telah diverifikasi oleh KLHK
Indikator Kinerja Sasaran I : a. Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	Rata-rata konsentrasi Air Badan Air di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter BOD pada tahun berjalan	Nilai konsentrasi air badan air di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter BOD pada tahun berjalan



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
b. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman,Perdagangan dan Perindustrian), untuk Parameter SO <sub>2</sub>	Rata-rata Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter SO <sub>2</sub> pada tahun berjalan	Nilai kualitas udara ambien di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter SO <sub>2</sub> pada tahun berjalan
c. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman,Perdagangan dan Perindustrian), untuk Parameter NO <sub>2</sub>	Rata-rata Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter NO <sub>2</sub> pada tahun berjalan	Nilai kualitas udara ambien di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter NO <sub>2</sub> pada tahun berjalan
Indikator Kinerja Sasaran II : a. Persentase sampah yang terkelola	Persentase sampah yang terkelola = $\frac{\text{Berat Sampah yang terkelola DLHK Sidoarjo per tahun}}{\text{Berat Timbulan Sampah Kabupaten Sidoarjo per tahun}} \times 100 \%$	Berat sampah yang terkelola DLHK Sidoarjo yaitu Berat sampah yang terkelola di TPST dan TPA pada tahun berjalan.
b. Persentase luasan RTH yang terkelola	Persentase luasan RTH yang terkelola = $\frac{\text{Luas Tutupan Lahan (km}^2\text{)}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo (km}^2\text{)}} \times 100 \%$	Luas Tutupan Lahan (km <sup>2</sup> ) merupakan luasan yang berasal dari perhitungan Indeks Kualitas Lahan
Indikator Kinerja Sasaran III : a. Nilai SAKIP	100% Dari Hasil penilaian = Komponen Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %, Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 %, Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 % dan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25 %	Dasar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
b. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Aspek dan Bobot Penilaian Indeks Pelayanan Publik yaitu : a. Kebijakan Pelayanan dengan bobot 20 % b. Profesionalisme SDM dengan bobot 25 % c. Sarana Prasarana dengan bobot 10 % d. Sistem Informasi Pelayanan Publik dengan bobot 10 % e. Konsultasi dan Pengaduan dengan bobot 25 % f. Inovasi dengan bobot 10 %	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
c. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan	Nilai Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
d. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Website SKM online

### III. TARGET KINERJA

#### a. Rincian Target Indikator Kinerja Tujuan Sebelum Perubahan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Indeks Kualitas Air	Indeks	51,52	51,53	51,54	51,55	51,56	51,57	51,57
2. Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19	85,19
3. Indeks Kualitas Lahan	Indeks	27,10	27,11	27,12	27,13	27,14	27,15	27,15

**b. Rincian Target Indikator Kinerja Tujuan Sesudah Perubahan**

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Indeks Kualitas Air	Indeks	51,52	51,53	51,54	51,55	51,56	51,57	51,57
2. Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19	85,19
3. Indeks Kualitas Lahan	Indeks	27,10	27,11	27,12	27,13	27,14	27,15	27,15

**c. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	mg/L	6,43	6,42	6,41	6,4	6,39	6,38	6,38
2. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk Parameter SO <sub>2</sub>	µg/ m <sup>3</sup>	7,85	7,84	7,83	7,82	7,81	7,8	7,8
3. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk Parameter NO <sub>2</sub>	µg/ m <sup>3</sup>	13,69	13,68	13,67	13,66	13,65	13,64	13,64
4. Persentase sampah yang dikelola	%	67	71	74	79	83	88	88
5. Persentase luasan RTH yang dikelola	%	5,13	5,14	5,15	5,16	5,17	5,18	5,18

d. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Setelah Perubahan (jika ada perubahan target sasaran Renstra PD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	mg/L	6,43	6,42	6,41	6,4	6,39	6,38	6,38
2. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk Parameter SO <sub>2</sub>	µg/ m <sup>3</sup>	7,85	7,84	7,83	7,82	7,81	7,8	7,8
3. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk Parameter NO <sub>2</sub>	µg/ m <sup>3</sup>	13,69	13,68	13,67	13,66	13,65	13,64	13,64
4. Persentase sampah yang dikelola	%	67	71	74	79	83	88	88
5. Persentase luasan RTH yang dikelola	%	5,13	5,14	5,15	5,16	5,17	5,18	5,18
6. Nilai SAKIP	Kategori	A (82,31)	A (83,10)	A (83,2)	A (83,25)	A (83,3)	A (83,35)	A (83,35)
7. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	30,58	34,24	34,5	34,75	35	35,25	35,25
8. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	B- (3,35)	A- (4,1)	A- (4,11)	A- (4,12)	A- (4,13)	A- (4,14)	A- (4,14)
9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sangat Baik (94,33)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (91)



e. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	80	81	82	83	84	84	84
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	87	87	87	87	87	87	87
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	Jenis	2	3	2	3	2	2	2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	3	5	7	7	7	7	7
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	%	90	90	90	90	90	90	90

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	-	3	3	4	4	4	4
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	%	-	100	100	100	100	100	100
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi retribusi perangkat daerah terhadap target yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	80	81	82	83	84	85	85
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang diselesaikan	%	-	-	100	100	100	100	100

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	%	-	-	100	100	100	100	100
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah surat rincian teknis Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/ disetujui	Rincian Teknis	60	70	70	70	70	70	70
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten) yang diterbitkan	%	-	-	100	100	100	100	100
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten yang disusun	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase lembaga masyarakat yang diberikan diklat	%	2,5	6,2	6,8	7,4	8,1	8,7	8,7
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan menjadi sekolah adiwiyata	Sekolah	1	2	3	4	5	6	6
	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diberi penghargaan SKPL/Green Industry	Usaha dan atau kegiatan	5	5	5	5	5	5	5



KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkungan hidup	%	93,3	93,6	94,2	95,4	95,7	96	96
	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	%	0,3	0,5	0,5	0,8	0,8	1	1
Pengelolaan Sampah	Jumlah berat sampah yang dikelola	Ton / hari	821	990	1054	1116	1198	1251	1251

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penerbitan Izin Pendaaurulan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Penerbitan Izin Pendaaurulan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Izin	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Peserta	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pentahapan pembangunan taman tematik kehati	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola	%	56	61	67	72	78	83	83

f. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Perubahan

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5
	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	8	8	8	8	8	8	8
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	80	81	91	91	91	91	91
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	87	87	90	90	91	91	91
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	Jenis	2	3	-	2	2	2	11
	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	-	-	-	90	90	90	90

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	3	5	7	7	7	7	7
	Persentase sarana prasarana yang berfungsi baik	%	-	-	70	70	70	70	70
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	%	-	-	-	90	90	90	90
	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	-	-	-	37	38	38	38
	Persentase pegawai telah terlayani administrasi kepegawaian dan mempunyai dokumen SKP	%	-	-	-	100	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang telah diamankan	%	-	-	-	65	70	75	75
Peningkatan Pelayanan BLUD	Target Pendapatan BLUD	Rp	-	-	13.000.000.000	13.000.500.000	13.001.000.000	13.002.000.000	13.002.000.000



KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	%	100	100	80	81	82	83	83
	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	80	81	82	83	84	85	85
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang diselesaikan	%	-	-	-	100	100	100	100
Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	%	-	-	-	100	100	100	100
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah surat rincian teknis Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/ disetujui	Rincian Teknis	60	70	120	125	130	135	135
	Persentase arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan	%	-	-	75	75	75	75	75



KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase lembaga masyarakat yang diberikan diklat	%	2,5	6,2	4,9	5	5,1	5,2	5,2
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan menjadi sekolah adiwiyata	Sekolah	-	-	-	4	5	6	15
	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diberi penghargaan SKPL/Green Industry	Usaha dan atau kegiatan	-	-	-	5	5	5	15
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkungan hidup	%	93,3	93,6	90	91	92	93	93

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten / Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	%	0,3	0,5	0,5	0,8	0,8	1	1
Pengelolaan Sampah	Jumlah berat sampah yang dikelola	Ton / hari	821	990	950	975	1000	1025	1025
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pentahapan pembangunan taman tematik kehati	Dokumen	-	1	-	-	-	1	2
	Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola	%	56	61	56	56	61	61	61
	Lokasi ruas jalan Kabupaten yang bersih	Ruas Jalan	-	-	232	232	232	232	232
	Jumlah taman aktif yang dipelihara ornamennya	Taman Aktif	-	-	7	7	7	7	7
	Persentase permohonan perantingan dan penebangan yang tertangani	%	-	-	100	100	100	100	100
	Persentase layanan data yang disediakan	%	-	-	100	100	100	100	100

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jumlah lokasi RTH yang dimonitor	Titik Lokasi	-	-	12	12	12	12	12
	Jumlah RTH Taman Aktif yang dikelola	RTH	-	21	22	23	24	25	25

Dari hasil Perubahan Renstra tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
2. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih dapat digunakan / relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2023 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 31 Maret 2023			
Tim Penyusun Perubahan Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo :			
<p>Mengetahui :</p> <p>Kepala Perangkat Daerah</p>  <p><b>Drs. MOH. BAHRUL AMIG.</b> <b>S.Sos., MM</b> Pembina Utama Muda NIP. 19701211 199101 1 001</p>	1. Ketua Tim	Dr. MOH. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM	
	2. Anggota	YUSTINA TRI PRASTIWI, S.AP	
	3. Anggota	HERY SANTOSO, S.STP., M.HP.	
	4. Anggota	LUH YUNI ARENI, SH., MH	
	5. Anggota	Ir. ANAS BUDI UTAMA NAZIR	
	6. Anggota	IDA APRIYANTI, ST	
	7. Anggota	SU'UDAH, SE	
	8. Anggota	BUDI KARIYAWAN	
	9. Notulen	MITHA FITRIYANTO, S, Si	



## KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen "**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**" telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan data dan informasi dalam penyelesaian Dokumen Rancangan Perubahan Renstra ini. Akhir kata, semoga dokumen Rancangan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, 31 Maret 2023  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO

  
Dr. M. BAHARU AMIG, S.Sos., MM  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19701211 199101 1 001





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-32
2.5 Kerjasama Daerah	II-39
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	III-10
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-16
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>V-1</b>
5.1 Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	V-1
5.2 Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	V-4
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	VI-1
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>VIII-1</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin	II-15
Tabel 2.2	Susunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Umur	II-16
Tabel 2.3	Susunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan	II-16
Tabel 2.4	Susunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-16
Tabel 2.5	Kebutuhan Pegawai dan Eksisting Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II-17
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	II-22
Tabel 2.7	Hasil Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021	II-24
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021	II-30
Tabel 2.9	Perbandingan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terhadap Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	II-33
Tabel 2.10	Perbandingan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	II-34
Tabel 2.11	Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo	II-36
Tabel 2.12	Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo	II-38
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	III-2
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-8
Tabel 3.3	Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	III-11
Tabel 3.4	Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	III-12
Tabel 3.5	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo	III-14
Tabel 3.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo	III-14
Tabel 3.7	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	III-17
Tabel 3.8	Nilai Skala Kriteria	III-17
Tabel 3.9	Rata-Rata Skor Isu Strategis	III-18



Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 5.1	Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	V-2
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-5
Tabel 5.3	Keterkaitan Tujuan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	V-7
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022	VI-7
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2026	VI-22
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan	I-2
Gambar 1.2	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Rentra OPD	I-3
Gambar 1.3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah	I-4
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	II-2
Gambar 2.2	Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air	II-26
Gambar 2.3	Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> sesuai baku mutu udara	II-27
Gambar 2.4	Persentase sampah yang terkelola	II-27
Gambar 2.5	Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan	II-28
Gambar 2.6	Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	II-29
Gambar 4.1	Cascading Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	IV-5



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 15 ayat 3 menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyiapkan rancangan renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan otonomi yang seluas luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok yakni:

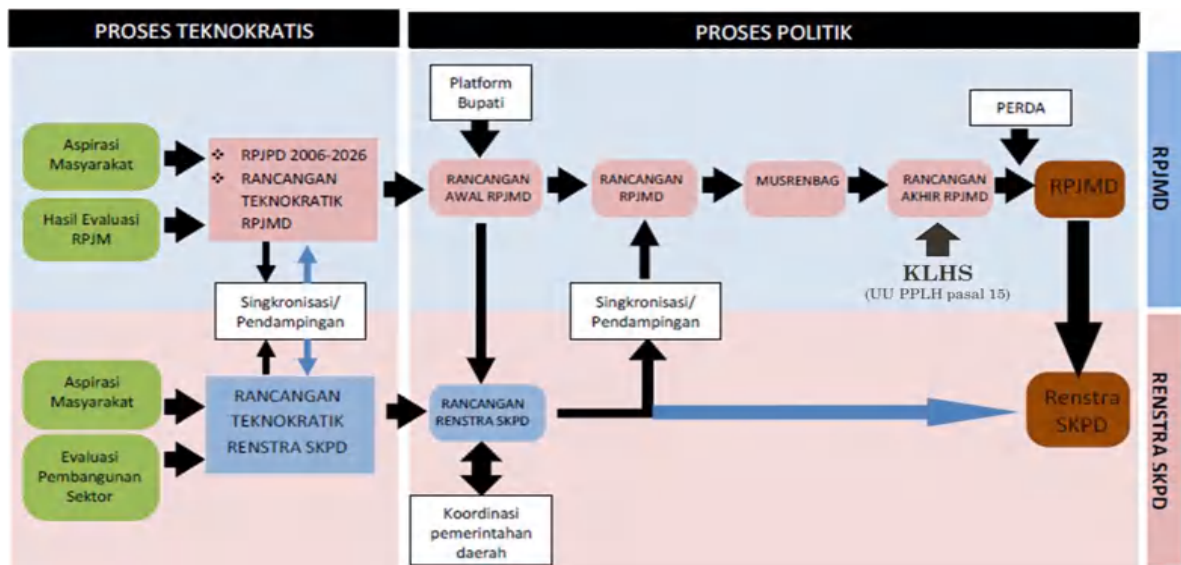
- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Dengan demikian fungsi renstra OPD dalam adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

Mendasari amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo berkewajiban Menyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan alat perencanaan yang diadakan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja



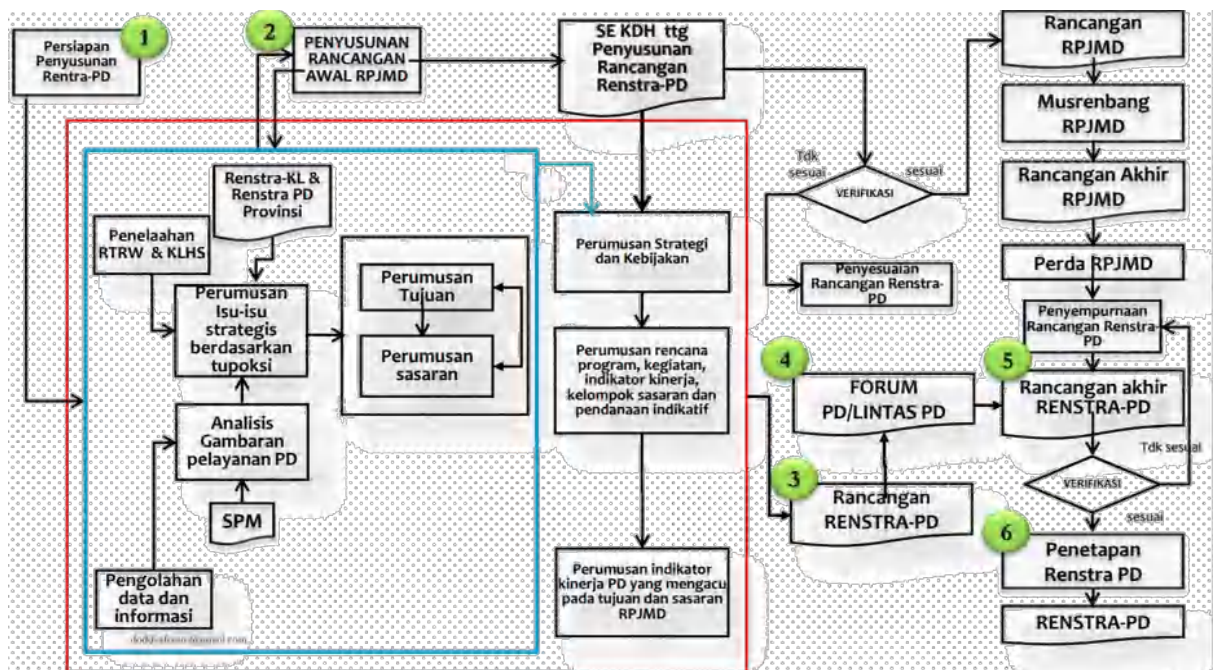
pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 proses Penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses Penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat, baik dalam konteks prosesnya maupun konten dari kedua dokumen tersebut yang saling melengkapi satu sama lain.



Gambar 1.1  
Arsitektur Kinerja Pembangunan

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis tahun 2021-2026. Dimana, dalam penyusunannya, telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Permendagri 86 Tahun 2017, Permendagri 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.

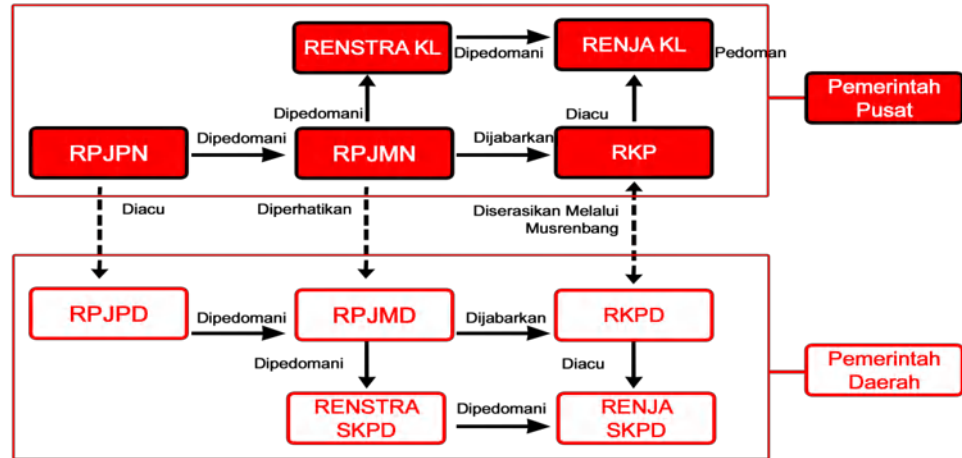




**Gambar 1.2**  
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra OPD

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga merupakan bagian dari unitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempedomani RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



**Gambar 1.3:**  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah

Pada RPJMD bahwasanya visi dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan” dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terletak pada misi ketiga “Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan” yang memiliki tujuan “Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan” dengan sasaran kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo juga memiliki hubungan pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dimana terletak pada sasaran strategis yang berhubungan langsung dengan tugas dan pokok yang dilakukan oleh kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Dalam konteks praktis maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi ketiga RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pada tahun 2021, disahkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dimana dalam Kepmendagri ini diatur tentang nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya untuk seluruh urusan pemerintah daerah. Selain itu, pada tahun 2022 terjadi perubahan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten





Sidoarjo. Implikasi disahkannya kebijakan tersebut adalah berubahnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terutama pada matriks Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Sehingga perlu dilakukan perubahan atas Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dilandasi oleh berbagai peraturan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;



14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon di Jawa Timur Untuk Penyelamatan Bumi;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Kelas Air Pada Air Sungai;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya;



27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
39. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2021-2026 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Membantu dalam sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD;
- d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Renja/RKT, RKA dan DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Kerjasama Daerah



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

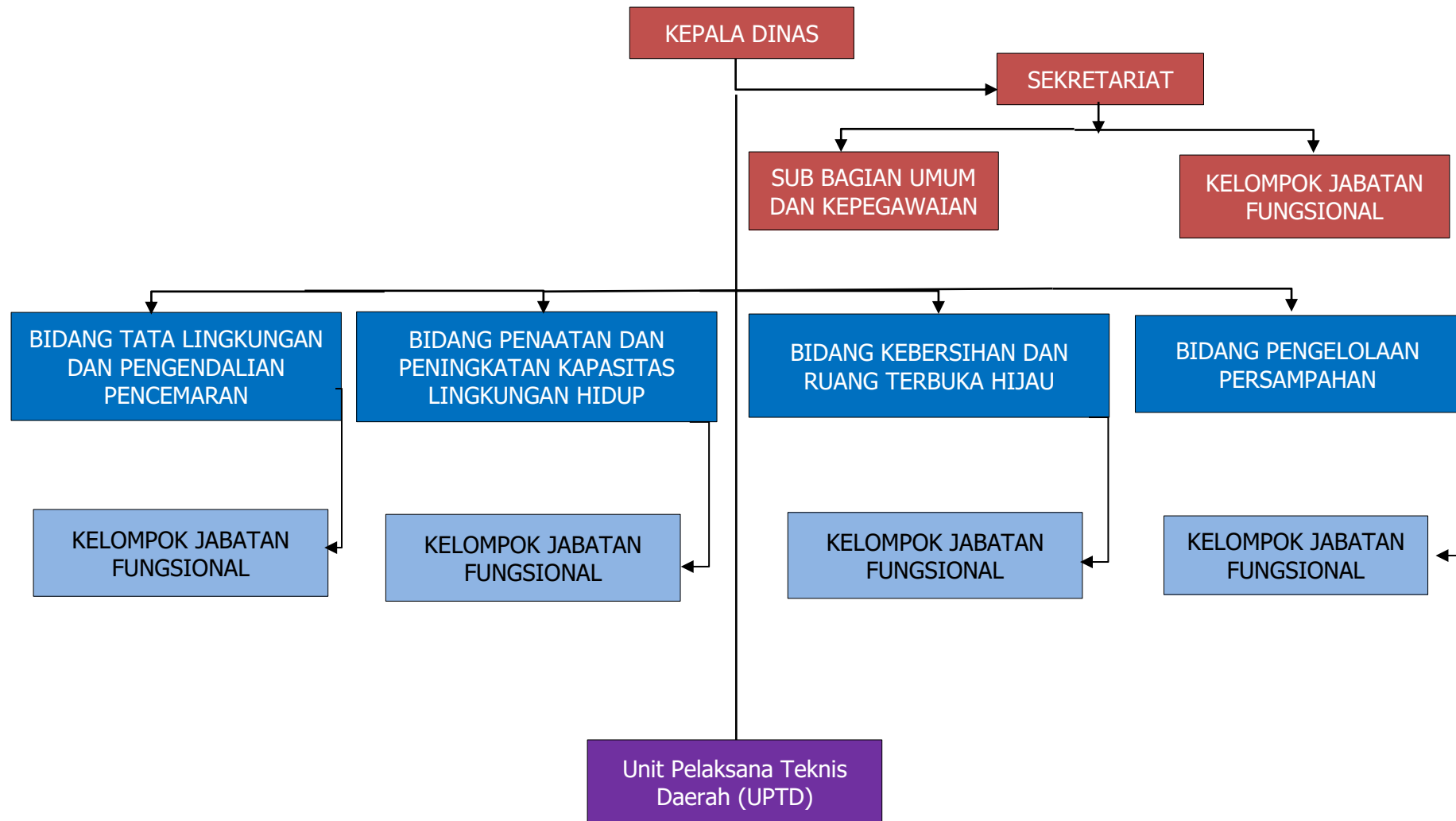
### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo





Uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan**

Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan dinas serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. Pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada dinas;
- e. Pelaksanaan sub kegiatan keuangan, meliputi :
  1. Pelaksanaan administrasi keuangan;
  2. Pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
  3. Pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran;
  4. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. Pelaksanaan sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi :
  - a. Penyusunan program kerja dinas;
  - b. Pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
  - c. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
  - d. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas;
  - e. Penyusunan laporan kinerja Dinas;



- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- g. Pelaporan kinerja Dinas ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya,

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Menerima dan mengoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindaklanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi / website Dinas;
- f. Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. Melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. Melaksanakan program / kegiatan area Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **3. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran**

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- b. Pembinaan dan Pelaksanaan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- c. Pelaksanaan sub kegiatan Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak meliputi :
  - 1. Menyusun perumusan kebijakan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;
  - 2. Melaksanakan kebijakan teknis data, tata lingkungan dan pencegahan dampak, meliputi:
    - a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;



- b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupn (RPPLH);
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - h. Sinkronisasi RPPLH Provinsi dan Ekoregion;
  - i. Penyusunan NSDA dan LH;
  - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan/atau sejenisnya;
  - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
  - n. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  - o. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
  - p. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Audit LH, Analisis resiko LH);
  - q. Pelaksanaan persetujuan SPPL;
  - r. Penilaian dan/atau pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
  - s. Pelaksanaan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - t. Pengajuan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang transparan
3. Menyusun dan memperbaharui data tata lingkungan dan pencegahan dampak; dan
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;
- d. Pelaksanaan sub kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan meliputi:
    1. Menyusun perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
    2. Melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan, meliputi:



- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
  - d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
  - e. Penentuan baku mutu lingkungan;
  - f. Pelaksanaan penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi;
  - g. Pelaksanaan penerbitan Surat Layak Operasional pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi;
  - h. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  - i. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar;
  - j. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar;
  - k. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar;
  - l. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - m. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - n. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar;
  - o. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar;
  - p. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
  - q. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - r. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  - s. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  - t. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  - u. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
  - v. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca.
3. Menyusun dan memperbaharui data penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;



5. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- e. Pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 meliputi :
  1. Menyusun perumusan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
  2. Melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3, meliputi:
    - a. Koordinasi penyusunan instrumen pengelolaan limbah B3;
    - b. Pelaksanaan penerbitan arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3;
    - c. Pelaksanaan penerbitan persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3 (Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten);
    - d. Pelaksanaan penerbitan Surat Layak Operasional Pengelolaan limbah B3 (kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten);
    - e. Penyediaan sarana prasarana B3 dan pengelolaan limbah B3; dan
    - f. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan B3 dan limbah B3;
  3. Menyusun dan memperbaharui data Pengelolaan B3 dan Limbah B3; dan
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- g. Pelaporan kinerja bidang tata lingkungan dan pengendalian pencemaran; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Pembinaan dan Pelaksanaan kebijakan teknis penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup meliputi :
  1. Menyusun perumusan kebijakan teknis pengawasan lingkungan hidup;
  2. Melaksanakan kebijakan teknis pengawasan lingkungan hidup, meliputi:
    - a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan kewajiban lainnya dalam persetujuan lingkungan ;



- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan kewajiban lainnya dalam persetujuan lingkungan ;
  - c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan ketaatan lingkungan hidup;
  - d. Pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup terhadap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan ketaatan lingkungan hidup terhadap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan ; dan
  - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
3. Menyusun dan memperbaharui data pengawasan lingkungan hidup;
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengawasan lingkungan hidup; dan
  5. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- d. Pelaksanaan sub kegiatan Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum meliputi:
    1. Menyusun perumusan kebijakan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;
    2. Melaksanakan kebijakan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum, meliputi:
      - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
      - b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan dan kewajiban lainnya dalam persetujuan lingkungan;
      - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
      - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
      - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
      - f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
      - g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
      - h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan dan kewajiban lainnya dalam persetujuan lingkungan;



- i. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
  - j. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - k. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
  - l. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
3. Menyusun dan memperbaharui data pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum; dan
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;
- e. Pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Kemitraan meliputi :
1. Menyusun perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan kemitraan, meliputi :
  2. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan kemitraan;
    - a. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
    - b. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
    - c. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
    - d. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
    - e. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
    - f. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.
    - g. Pengembangan materi bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan lingkungan hidup;
    - h. Pengembangan metode bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan lingkungan hidup;
    - i. Pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan lingkungan hidup;
    - j. Peningkatan kapasitas penyuluh lingkungan hidup;
    - k. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; dan
    - l. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
  3. Menyusun dan memperbaharui data, pembinaan dan kemitraan;
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis data, pembinaan dan kemitraan;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. Pelaporan kinerja bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.





## 5. Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Pembinaan dan Pelaksanaan kebijakan teknis Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
- c. Pelaksanaan sub kegiatan Pertamanan dan Kebersihan meliputi :
  1. Menyusun perumusan kebijakan teknis pertamanan dan kebersihan;
  2. Melaksanakan kebijakan teknis pertamanan, konservasi keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kebersihan;
    - a. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
    - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
    - c. Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati;
    - d. Pengelolaan kebun raya; dan
    - e. Pengelolaan kebersihan pada ruas jalan perkotaan;
  3. Menyusun dan memperbaharui data pertamanan dan kebersihan; dan
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pertamanan dan kebersihan;
- d. Pelaksanaan sub kegiatan Keindahan dan Dekorasi meliputi :
  1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keindahan dan dekorasi;
  2. Melaksanakan kebijakan teknis keindahan dan dekorasi;
    - a. Pengelolaan keindahan dan dekorasi;
    - b. Pengelolaan sarana dan prasarana terkait keindahan dan dekorasi;
  3. Menyusun dan memperbaharui data keindahan dan dekorasi; dan
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis keindahan dan dekorasi;
- e. Pelaksanaan sub kegiatan Pendataan, Pengendalian dan pelayanan meliputi:
  1. Menyusun perumusan kebijakan teknis pendataan, pengendalian dan pelayanan;
  2. Melaksanakan kebijakan teknis pendataan, pengendalian dan pelayanan;
  3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan RTH, Taman KEHATI, dan kebersihan ruas jalan perkotaan;
  4. Menyusun dan memperbaharui pendataan, pengendalian dan pelayanan;
  5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis, pendataan, pengendalian dan pelayanan; dan
  6. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;



- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis kebersihan dan ruang terbuka hijau;
- g. Pelaporan kinerja bidang kebersihan dan ruang terbuka hijau; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

## **6. Bidang Pengelolaan Persampahan**

Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pengelolaan Persampahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Pengelolaan Persampahan;
- b. Pembinaan dan Pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Persampahan;
- c. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- d. Pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Pengolahan Sampah meliputi :
  - 1. Menyusun perumusan kebijakan teknis Pelayanan Pengolahan Sampah;
  - 2. Melaksanakan kebijakan teknis Pelayanan Pengolahan Sampah, meliputi :
    - a. Pengawasan dan pengendalian kebersihan;
    - b. Pembinaan usaha-usaha kebersihan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
    - c. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
    - d. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
    - e. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
    - f. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
    - g. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali;
    - h. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan;
    - i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
    - j. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah;
    - k. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
    - l. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
    - m. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
    - n. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
    - o. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;



- p. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - q. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  - r. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - s. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - t. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
  - v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
3. Menyusun dan memperbaharui data Pelayanan Pengolahan Sampah; dan
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis Pelayanan Pengolahan Sampah;
- e. Pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah meliputi :
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah;
  2. Mengoordinasikan data, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah;
  3. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan pelayanan persampahan;
  4. Menerbitkan serta merumuskan pemberian rekomendasi pembuangan langsung yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
  5. Menyusun dan memperbaharui data pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah;
  6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis data, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah; dan
  7. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan persampahan;
  - g. Pelaporan kinerja bidang pengelolaan persampahan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.



## 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
- b. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Menyusun perumusan kebijakan teknis angkutan sampah;
- d. Menyusun pengendalian titik angkut dan ritasi pelayanan angkutan sampah dari TPS/TPS3R ke TPA;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana angkutan sampah;
- f. Menyusun dan memperbaharui data angkutan sampah;
- g. Menerima dan mengolah sampah;
- h. Melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- i. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- j. Melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang rusak atau kurang;
- k. Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi pengelolaan sampah di UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- n. Menyusun rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi pengelolaan penanganan sampah;
- o. Angkutan sampah sebagaimana dimaksud adalah menangani dan melayani pengangkutan sampah dari TPST, TPS, TPS3R ke Tempat Pemrosesan Akhir;
- p. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
- b. Menyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;
- c. Melaksanakan penerimaan/pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian laboratorium;
- d. Melaksanakan pengembangan metode dan standar analisis pengujian;
- e. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;
- f. Melaksanakan verifikasi data dan hasil pengujian Laboratorium;
- g. Melaksanakan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitasnya berdasarkan standar metode uji dan standar mutu pengambilan sampel;
- h. Melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen Laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
- i. Melaksanakan dan mengembangkan prosedur quality analisis (QA) atau quality control (QC) sesuai dengan standar yang berlaku;
- j. Membuat laporan dan saran atas quality analisis (QA) atau quality control (QC) untuk peningkatan kualitas Laboratorium;
- k. Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
- m. Menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
- n. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
- o. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya. Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan



evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan. Pembinaan, Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan modal penting yang menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Total terdapat 266 orang PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pegawai Tenaga Kontrak sebanyak 17 orang, dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 688 orang. Berikut merupakan profil jumlah pegawai yang ditinjau dari jenis kelamin, golongan, dan tingkat pendidikan.

**Tabel 2.1**  
Susunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	229 orang
2	Perempuan	37 orang
<b>Total</b>		266 orang

*Sumber data: DLHK, Juli 2022*

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin. Jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 229 orang dan perempuan 37 orang. Jumlah pegawai ditinjau berdasarkan umur ditunjukkan pada Tabel 2.2 kelompok umur dengan jumlah pegawai tertinggi adalah umur 41-50 tahun sebanyak 110 orang dan kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 120 orang. Sedangkan pegawai yang berusia  $\leq 40$  tahun sebanyak 36 orang. Artinya dalam 5 tahun ke depan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membutuhkan banyak tambahan sumber daya manusia dikarenakan sudah memasuki waktu pensiun.





**Tabel 2.2**

Susunan PNS Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	20-30 Tahun	9 orang
2	31-40 Tahun	27 orang
3	41-50 Tahun	110 orang
4	51-60 Tahun	120 orang
Total		266 orang

Sumber data : DLHK, Juli 2022

Jumlah pegawai berdasarkan golongan keperangkatannya, terlihat sebagian besar pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai Golongan I sebanyak 89 orang, Golongan II sebanyak 132 orang, Golongan III sebanyak 39 orang dan Golongan IV sebanyak 6 orang terlihat pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3**

Susunan PNS Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	6 orang
2	Golongan III	39 orang
3	Golongan II	132 orang
4	Golongan I	89 orang
Total		266 orang

Sumber data: DLHK, Juli 2022

Jika ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan berdasarkan tabel 2.4, sebanyak 82 orang berpendidikan terakhir SD, 73 orang memiliki pendidikan terakhir SMP dan 67 memiliki pendidikan terakhir SMA. Jabatan yang dengan pendidikan terakhir SD, SMP dan SMA ini antara lain pramu taman, pramu kebersihan, dsb. Jika dilihat dari jabatan dan beban kerja yang dilakukan, tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi.

**Tabel 2.4**

Susunan PNS Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana	8 orang
2	Sarjana	29 orang
3	Diploma 3	7 orang
4	SMA	67 orang
5	SMP	73 orang
6	SD	82 orang
Total		266 orang

Sumber data: DLHK, Juli 2022



Terakhir, adalah analisis beban kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Tabel 2.5). Berdasarkan analisis, total kebutuhan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebanyak 1.351 orang, eksisting saat ini telah tersedia sebanyak 969 pegawai. Yang artinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih terjadi defisit pegawai sebanyak 382 orang. Kebutuhan pegawai terbesar ada pada jabatan pramu taman dan pramu kebersihan.

**Tabel 2.5**  
Kebutuhan Pegawai dan Eksisting Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
			ASN	NON ASN
<b>JUMLAH</b>		<b>1351</b>	<b>266</b>	<b>703</b>
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	1	1	0
2	- Sekretaris	1	1	0
3	- Kasubbag Perencanaan Dan Pelaporan	1	1	0
4	- Pengelola Bahan Perencanaan	3	1	1
5	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	0	0
6	- Pengadministrasi Umum	2	1	0
7	- Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	0
8	- Pengelola Kepegawaian	2	0	1
9	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	3	2	0
10	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	0
11	- Teknisi Sarana dan Prasarana	4	1	0
12	- Pengemudi	1	0	0
13	- Pramu Kebersihan	13	0	12
14	- Petugas Keamanan	16	1	13
15	- Customer Service	2	0	2
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>				
16	- Pranata Komputer Mahir	1	1	0
17	- Kasubbag Keuangan	1	1	0
18	- Pengelola Keuangan	1	1	0
19	- Bendahara	1	1	0
20	- Pengelola Gaji	1	1	0
21	- Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
22	- Penata Laporan Keuangan	1	1	0



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN		KEBUTUHAN	EKSISTING	
				ASN	NON ASN
23	-	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	1	1	0
24	-	Kepala Seksi Tata Lingkungan Dan Pencegahan Dampak	1	1	0
25	-	Penelaah Dampak Lingkungan	1	1	0
26	-	Pengelola Lingkungan	3	1	1
JABATAN FUNGSIONAL					
27	-	Pengendalian Dampak Lingkungan Pertama	1	1	0
28	-	Kepala Seksi Penanggulangan Dan Pemulihan Lingkungan	1	0	0
29	-	Pengelola Lingkungan	3	1	1
30	-	Pengadministrasi Umum	1	0	1
31	-	Pengelola Kegiatan	1	0	0
32	-	Kepala Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	1	1	0
33	-	Pengelola Lingkungan	3	0	1
34	-	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	1	0
35	-	Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup	1	1	0
36	-	Pengelola Penyehatan Lingkungan	1	0	1
37	-	Pengelola Lingkungan	2	1	0
38	-	Pengadministrasi Umum	1	1	0
39	-	Pengelola Kegiatan	1	0	0
40	-	Penyuluh Lingkungan Hidup	1	0	1
41	-	Pengawas Lingkungan Hidup	8	1	0
42	-	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	1	0	0
43	-	Kepala Seksi Pengaduan Sengketa Lingkungan Dan Penegakan Hukum	1	1	0
44	-	Pengelola Lingkungan	2	1	1
45	-	Penyuluh Lingkungan Hidup	1	0	0
46	-	Kepala Seksi Pembinaan Dan Kemitraan	1	1	0
47	-	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	3	1	2
48	-	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	4	0	0



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN			KEBUTUHAN	EKSISTING	
					ASN	NON ASN
49		-	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	3	0	0
50		-	Pengelola Lingkungan	3	1	1
51		-	Pengelola Informasi dan Komunikasi	1	0	0
52	-		Kepala Bidang Kebersihan dan RTH	1	1	0
53		-	Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan	1	1	0
54		-	Pengelola Data	2	2	0
55		-	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	24	8	0
56		-	Pengemudi	7	4	2
57		-	Pramu Taman	304	27	188
58		-	Koordinator	5	0	0
59		-	Analisis Taman	2	1	1
60		-	Pengadministrasian Umum	1	1	0
61		-	Pengelola Kegiatan	1	1	0
62		-	Pranata Taman	5	0	0
63		-	Kepala Seksi Keindahan dan Dekorasi	1	1	0
64		-	Pengelola Data	2	0	0
65		-	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	3	1	0
66		-	Pramu Taman	40	4	13
67		-	Pengemudi	3	0	0
68		-	Kepala Seksi Pendataan, Pengendalian dan Pelayanan	1	1	0
69		-	Pramu Kebersihan	320	93	186
70		-	Pengawas Lapangan, Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	36	20	0
71		-	Koordinator	5	1	0
72	-		Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	1	1	0
73		-	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah	1	1	0
74		-	Penyuluh Lingkungan (Penyuluh Kebersihan)	6	1	2
75		-	Pengelola Data	1	1	0
76		-	Pengadministrasian Penerimaan	1	1	0
77		-	Juru Pungut Retribusi	14	3	10
78		-	Kepala Seksi Angkutan Sampah	1	1	0



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN			KEBUTUHAN	EKSISTING		
					ASN	NON ASN	
79			-	Koordinator	4	1	0
80			-	Pengelola Data	2	1	1
81			-	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	4	2	0
82			-	Pengemudi	68	17	44
83			-	Pramu Kebersihan	136	17	85
84			-	Operator Alat Berat	6	0	2
85			-	Kepala Seksi Pelayanan Pengolahan Sampah	1	1	0
86			-	Penyuluh Lingkungan	11	0	6
87			-	Pengelola Sampah	7	1	6
88			-	Pengadministrasian Umum	1	2	0
89			-	Pengelola Kegiatan	1	1	0
90			-	Pramu Kebersihan	58	0	28
91			-	Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1	0	0
92			-	Kasubbag Tata Usaha UPTD	1	0	0
93			-	Pengelola Sampah	1	0	0
94			-	Pengadministrasian Umum	3	1	1
95			-	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	2	0	1
96			-	Pengadministrasian Keuangan	1	1	0
97			-	Operator Alat Berat	10	2	6
98			-	Petugas Keamanan	8	1	4
99			-	Pramu Kebersihan	15	1	12
100			-	Teknisi Peralatan dan Mesin (Landfill)	4	0	2
101			-	Pramu Kebersihan (Pekerja dan Tenaga Pemilah Sampah)	26	0	26
102			-	Pramu Kebersihan (Pekerja LTP)	4	0	3
103			-	Pengemudi	5	0	2
104			-	Teknisi Peralatan dan Mesin (Petugas Kantor)	5	1	2
105			-	Teknisi Peralatan dan Mesin (Landfill)	6	0	1
106			-	Teknisi Peralatan dan Mesin (Pemilah Sampah)	2	0	0
107			-	Teknisi Peralatan dan Mesin (Pengkomposan)	1	0	0
108			-	Teknisi Peralatan dan Mesin (LTP)	1	0	0
109			-	Pranata Taman	1	0	1



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN			KEBUTUHAN	EKSISTING	
					ASN	NON ASN
110		-	Operator Jembatan Timbang	3	0	1
111		-	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	2	0	2
112		-	Teknisi Elektronik (Elektrikal)	3	0	2
113		-	Operator Mesin (Baler Station)	1	0	1
114		-	Operator Mesin (Wheel Loader)	2	0	2
115		-	Operator Mesin (Forklift)	1	0	1
116		-	Operator Mesin (Skip Handler)	1	0	1
117		-	Operator Mesin (Shredder)	1	0	1
118		-	Operator Mesin (Windrow Turner)	1	0	1
119		-	Operator Mesin (Screen)	1	0	1
120		-	Pengelola laboratorium	2	0	1
121		-	Pengawas Pengkomposan	1	0	1
122		-	Pekerja Pengkomposan	8	0	8
123	-		Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	1	0	0
124		-	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	0	0
125		-	Analisis Laboratorium	2	1	0
126		-	Pengelola Laboratorium	3	3	0
127		-	Pengelola Sampel Pengujian	1	0	1
128		-	Pramu Laboratorium	6	0	3
129		-	Pengadministrasi Umum	1	1	0
130		-	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	0	0
131		-	Pengadministrasi Keunagan	1	0	0
132		-	Pengadministrasi Penerimaan	1	0	0
133		-	Petugas Keamanan	4	0	2
134		-	Pramu Kebersihan	3	0	1
135		-	Pranata Pengambilan Sampel	2	0	0
JABATAN FUNGSIONAL						
136		-	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	1	1	0

Sumber data : Analisis Beban Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan , 2022





Jika ditinjau dari kebutuhan data di atas dapat diketahui bahwa eksisting pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan saat ini sebanyak 969 orang dengan total kebutuhan 1351 pegawai, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan atau kebutuhan pegawai sebesar 28% atau 385 pegawai.

## 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dengan ketersediannya pada sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang pencapaian sasaran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Berikut ini uraian tabel tentang sarana dan prasarana:

**Tabel 2.6**  
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup  
dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

NO	SARANA	JUMLAH	KONDISI	
			Baik	Rusak
<b>I. Kendaraan Dinas</b>				
1	Sepeda Motor Roda 2	48 Unit	47 Unit (44 Unit mutasi ke Dishub)	1 Unit
2	Sepeda Motor Roda 3	148 Unit	134 Unit (57 Unit mutasi ke kecamatan)	14 Unit
3	Roda 4 Station	10 Unit	10 Unit	-
4	Roda 4 Pick Up	26 Unit	26 Unit (2 Unit mutasi ke Dishub)	-
5	Truk Tangki Penyiraman	8 Unit	8 Unit	-
6	Truk Sky Master Listrik	4 Unit	4 Unit (3 Unit mutasi ke Dishub)	-
7	Dump Truck Angkutan Sampah	46 Unit	45 Unit	1 Unit
8	Truck Arm Roll Angkutan Sampah	27 Unit	27 Unit	-
9	Mobil Penyapu Jalan	2 Unit	2 Unit	-
10	Tuck Crane	1 Unit	1 Unit	-
<b>II. Alat Berat</b>				
1	Excavator	6 Unit	6 Unit	-
2	Buldozer	6 Unit	6 Unit	-
<b>III. Peralatan Kantor</b>				
1	Laptop	42 Unit	42 Unit	-
2	Komputer PC	64 Unit	64 Unit	-
3	Printer	67 Unit	67 Unit	-
4	Scanner	6 Unit	6 Unit	-
5	AC Ruang	35 Unit	35 Unit	-
6	Kamera Drone	2 Unit	2 Unit	-
7	HEPA Filter	3 Unit	2 Unit	1 Unit

Sumber data: DLHK, Juli 2022



Sumber daya perangkat daerah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 551 unit dengan skala 97% dalam kondisi baik, serta 3% dalam kondisi buruk. Dari data di atas diketahui juga terdapat pemindahan sarana prasarana yakni Truck Skymaster ke Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terutama di bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mengenai kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup telah melakukan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada Tahun 2016-2021 diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja diantaranya: (1) Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air; (2) Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi  $SO_2$  dan  $NO_2$  sesuai baku mutu udara; (3) Konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD; (4) Kualitas udara ambien perkotaan (roadsite, permukiman, perdagangan dan perindustrian) untuk parameter  $SO_2$ ; (5) Kualitas udara ambien perkotaan (roadsite, permukiman, perdagangan dan perindustrian) untuk parameter  $NO_2$ ; (6) Persentase sampah yang terkelola; (7) Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan; (8) Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi.

Dalam pelaksanaannya, kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah memuaskan. Dilihat dari pencapaian realisasi kinerja yang telah melampaui target yang ditetapkan. Namun terlihat pada realisasi kinerja pada indikator kinerja proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Berikut hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo periode tahun 2016-2021:



**Tabel 2.7**

Hasil Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja DLHK	Target Renstra OPD pada tahun						Realisasi Capaian pada tahun						Rasio Capaian pada tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air	23%	28%	25%	28%	43%		23%	23,58%	28,18%	43%	46%		100%	91%	113%	154%	107%	
2	Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> sesuai baku mutu udara	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
3	Konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD						6,43 mg/L					6,43 mg/L	5,16 mg/L						125%
4	Kualitas udara ambien perkotaan (roadsite, permukiman, perdagangan dan perindustrian) untuk parameter SO <sub>2</sub>						7,85 µg/m <sup>3</sup>					7,85 µg/m <sup>3</sup>	7,75 µg/m <sup>3</sup>						101%



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

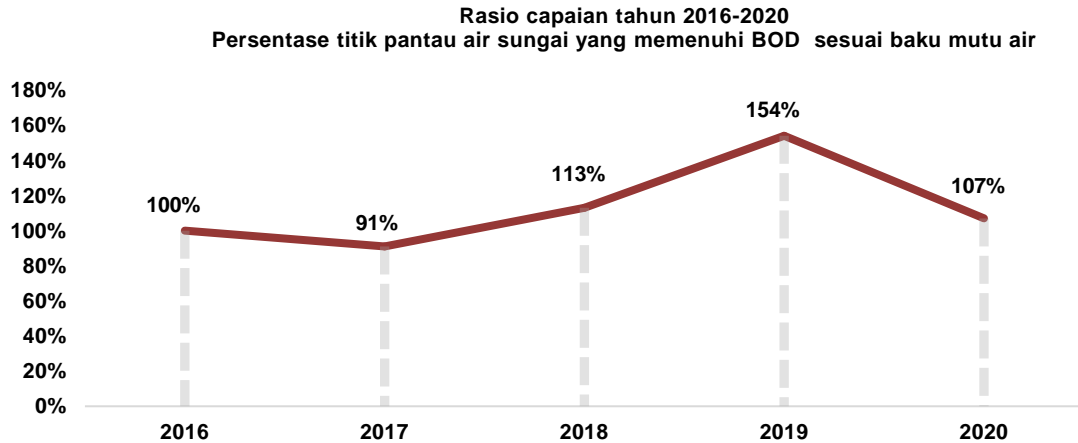
No	Indikator Kinerja DLHK	Target Renstra OPD pada tahun						Realisasi Capaian pada tahun						Rasio Capaian pada tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Kualitas udara ambien perkotaan (roadside, permukiman, perdagangan dan perindustrian) untuk parameter NO <sub>2</sub>						13,69 µg/m <sup>3</sup>					13,69 µg/m <sup>3</sup>	14,57 µg/m <sup>3</sup>						94%
6	Persentase sampah yang terkelola	58,7%	60,7%	62,28%	64,28%	72,28%	67%	58,7%	60,7%	62,25%	66%	67%	68%	100%	100%	100%	103%	93%	101%
7	Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan	1,66%	1,67%	1,67%	1,67%	1,69%	1,1%	0,96%	1,04%	1,05%	1,05%	1,06%	1,08%	58%	62%	63%	63%	63%	98%
8	Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	74%	76%	78%	80%	82%	84%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Berikut merupakan penjabaran kinerja dari masing-masing indikator:

1. **Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air**



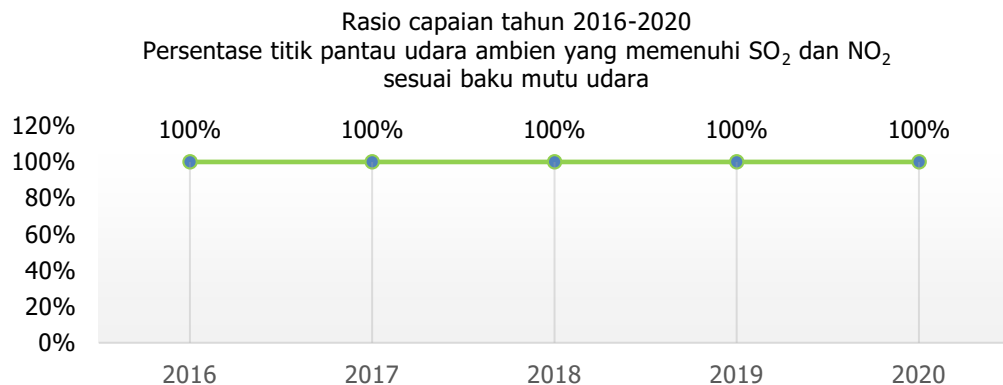
Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Gambar 2.2

Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air

Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air antara target 23% dan realisasi 23% dengan rasio capaian yaitu 100% bahwa pada tahun 2016 terealisasi sesuai dengan target yang telah dilakukan. Namun hal ini mengalami penurunan rasio capaian pada tahun 2017 dengan target 28% realisasi sebesar 25,58 % dengan rasio capaian yaitu 91%. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2020 titik pantau air sungai sesuai dengan mutu air telah baik pada rasio capaian yaitu melebihi target yang telah ditentukan diatas 100%.



## 2. Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai baku mutu udara



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Gambar 2.3  
Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai baku mutu udara

Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai baku mutu udara mulai tahun 2016 hingga 2020 bahwa terlihat antara target dan realisasi yaitu 100%. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditentukan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mampu dalam kinerja pantau udara ambien memenuhi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai dengan mutu udara yang baik dan sesuai dengan udara kabupaten Sidoarjo.

## 3. Persentase sampah yang terkelola



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

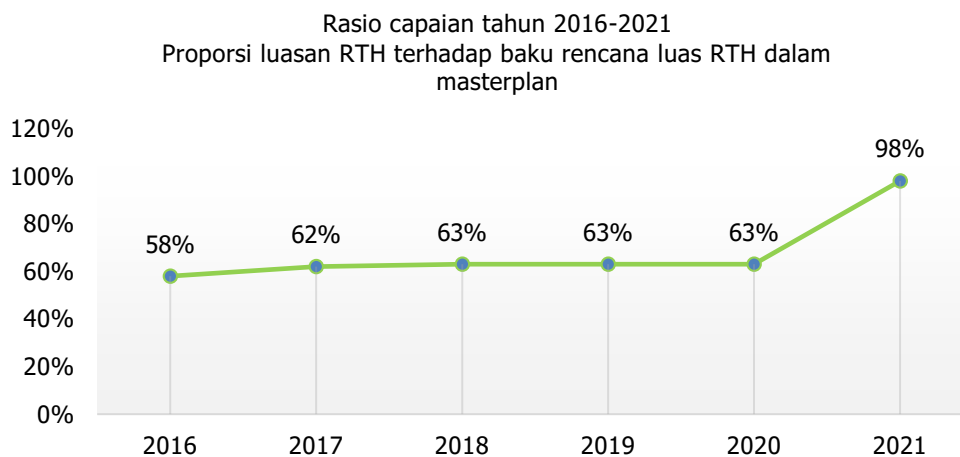
Gambar 2.4  
Persentase sampah yang terkelola





Persentase sampah yang terkelola realisasinya pada 2016-2018 sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu dengan rasio 100%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan rasio capaian sebesar 103%, namun tahun 2020 belum mencapai target yang telah ditentukan 72,2% dan realisasi 67% yaitu terdapat rasio capaian 93%. Tetapi pada tahun 2021 rasio capaian mengalami kenaikan hingga 101% dari target 67% dan realisasi 68%.

#### 4. Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Gambar 2.5  
Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan

Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan dari tahun 2016-2021 belum memenuhi target yang telah ditentukan hal ini dikarena susah nya dalam rencana luasan RTH yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi rasio capaian pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 98% yang mana menjadi rasio capaian tertinggi dalam kurung waktu 6 (enam) tahun.



## 5. Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Gambar 2.6

Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi

Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi mulai tahun 2016 hingga 2021 bahwa terlihat antara target dan realisasi yaitu 100%. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditentukan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mampu dalam kinerja pada ketersediaan PJU dalam kondisi layak sesuai dengan mutu udara yang baik dan sesuai dengan kebutuhan PJU dan kondisi kelayakannya di Kabupaten Sidoarjo.



**Tabel 2.8**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja DLHK	Target Rentsra OPD pada tahun						Realisasi Capaian pada tahun						Rasio Capaian pada tahun						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi baku mutu air	-	4.464.475.105	4.332.371.040	5.890.562.025	4.154.280.090		-	2.735.636.375	3.271.453.338	5.191.293.062	3.403.650.565		-	61,23%	75,51%	88%	82%		4.710.422.065	3.650.508.335
2	Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> sesuai baku mutu udara	-	4.464.475.105	4.332.371.040	5.890.562.025	4.154.280.090		-	2.735.636.375	3.271.453.338	5.191.293.062	3.403.650.565		-	61,23%	75,51%	88%	82%		4.710.422.065	3.650.508.335
3	Konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD	-					5.108.319.661	-					3.623.892.329	-					71%	5.108.319.661	3.623.892.329
4	Kualitas udara ambien perkotaan (roadsite, permukiman, perdagangan dan perindustrian) untuk parameter SO <sub>2</sub>	-					5.108.319.661	-					3.623.892.329	-					71%	5.108.319.661	3.623.892.329



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

No	Indikator Kinerja DLHK	Target Rentsra OPD pada tahun					Realisasi Capaian pada tahun						Rasio Capaian pada tahun					Rata-Rata Pertumbuhan			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
5	Kualitas udara ambien perkotaan (roadsite, permukiman, perdagangan dan perindustrian) untuk parameter NO <sub>2</sub>	-					5.108.319,661	-					3.623.892,329	-					71%	5.108.319,661	3.623.892,329
6	Persentase sampah yang terkelola	-	54.508.670,000	80.489.455,000	32.563.474,525	40.083.242,187	32.170.062,892	-	45.769.841,355	52.705.249,136	28.442.586,852	26.723.521,226	27.249.510,332	-	83,97%	65,48%	87%	67%	85%	43.339,366,446	36.178,141,780
7	Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan	-	14.866.510,000	22.529.191,200	20.389.558,071	22.870.064,836	12.775.005,824	-	13.431.178,886	19.533.998,990	14.076.049,750	15.500.248,649	11.150.500,046	-	90,35%	86,71%	69%	68%	87%	18.686,065,986	14.738,395,264
8	Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU konidisi layak fungsi	-	73.693.255,000	90.766.004,400	102.510.045,103	102.935.493,553	102.031.799,307	-	69.008.759,481	83.034.568,227	73.683.849,101	87.439.313,247	97.664.979,053	-	93,64%	91,48%	72%	85%	96%	94.387,319,473	82.166,293,822

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo



Berdasarkan tabel 2.8 diketahui bahwa dari 24 program pada rencana strategis periode 2016-2021, rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran sudah cukup baik karena penyerapan anggaran selama tahun 2016-2021 pada casio capaian mencapai 79 % akan tetapi masih kurang maksimal karena kurang dari 100 %. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan. Kurangnya penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat dikarenakan berbagai faktor, antara lain:

- r. Kurangnya sumber daya manusia khususnya Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan Persampahan
- s. Kurangnya luas RTH dalam masterplan sehingga tidak tercapainya serapan anggaran dikarena lahan RTH yang tidak banyak di Kabupaten Sidoarjo

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada sub bab ini akan diuraikan tantangan dan peluang yang didapatkan berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

### **2.4.1 Telaahan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur**

Telaah sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tabel 2.9) dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (Tabel 2.10) dilakukan untuk mengetahui kesinambungan antara indikator kinerja yang ada dan berkontribusi terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.



**Tabel 2.9**

Perbandingan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terhadap Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
1	Konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD	Sasaran Meningkatnya kualitas air dengan Target Indikator Kinerja sasaran Nilai Indeks Kualitas Air pada Tahun 2024 : 55,5
2	Kualitas udara ambien perkotaan (roadsite, permukiman, perdagangan dan perindustrian) untuk parameter SO <sub>2</sub>	Sasaran Meningkatnya kualitas udara dengan Target Indikator kinerja sasaran Nilai Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2024 : 84,5
	Kualitas udara ambien perkotaan (roadsite, permukiman, perdagangan dan perindustrian) untuk parameter NO <sub>2</sub>	
3	Persentase sampah yang terkelola	Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah dengan Target Indikator Kinerja Jumlah Sampah yang dikelola pada Tahun 2024 : 26.456.883 Ton
4	Persentase luasan RTH yang terkelola	Sasaran Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut dengan Target Indikator Kinerja Nilai Indeks Kualitas Lahan pada Tahun 2024 : 65,5





**Tabel 2.10**

Perbandingan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
1	Konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD	Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS) , Pencemaran Udara dan Kerusakan Lahan dengan Target Indikator Kinerja Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD pada Tahun 2024 : 7,05 mg/L
2	Kualitas udara ambien perkotaan (roadsite, permukiman, perdagangan dan perindustrian) untuk parameter SO <sub>2</sub>	Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) dengan Target Indikator Kinerja Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) pada Tahun 2024 Parameter SO <sub>2</sub> : 17,57 ppm dan NO <sub>2</sub> : 8,07 ppm
	Kualitas udara ambien perkotaan (roadsite, permukiman, perdagangan dan perindustrian) untuk parameter NO <sub>2</sub>	
3	Persentase sampah yang terkelola	Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) dengan Target Indikator Kinerja Persentase sampah yang dikelola pada Tahun 2024 : 96,50 %
4	Persentase luasan RTH yang terkelola	Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) dengan Target Indikator Kinerja Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) pada Tahun 2024 Parameter SO <sub>2</sub> : 17,57 ppm dan NO <sub>2</sub> : 8,07 ppm

Berdasarkan hasil telaahan terhadap sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:



- a) Tantangan:
1. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
  2. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
  3. Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang;
  4. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
  5. Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah
- b) Peluang
1. Meningkatnya jumlah komunitas lingkungan hidup yang menuntut ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  2. Banyaknya instrumen yang meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder seperti ADIPURA, ADIWIYATA, dan lain-lain.

#### **2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**

Selanjutnya setelah menguraikan tantangan dan peluang berdasarkan telaah sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dilakukan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (Tabel 2.11) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Tabel 2.12).



**Tabel 2.11**  
**Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
1	Sistem Persampahan	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	Menerapkan konsep 3 R (Recycle, Reduce dan Re- use). Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan dan penanganan sampah dilakukan sebagai berikut : a. Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang tersebar pada wilayah SSWP di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan; b. Pembangunan LPS dapat dilakukan pada lahan- lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah c. Upaya Pengelolaan sampah secara mandiri; d. Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/persampahan skala kabupaten dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah terpadu pada Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) di Jabon dan Tarik penanganan kebersihan dan persampahan skala Kabupaten juga dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam penanganan sampah. Pengembangan TPA di lokasi lain harus sesuai dengan kajian teknis penentuan TPA lahan- lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah;
2	Sistem Jaringan Pematusan/ Drainase	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	Pembuangan Air Limbah dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat. Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat. Sedangkan sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. Kemudian juga diarahkan terdapat ketentuan bagi setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat untuk dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke media lingkungan. Pengelolaan limbah cair industri dilakukan dengan :



No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan limbah cair industri dan kegiatan usaha lainnya dilakukan melalui sistem pengelolaan limbah cair setempat dan/atau terpusat.</li><li>2. Pembuangan limbah cair industri dan kegiatan usaha lainnya ke media lingkungan harus mendapatkan ijin pembuangan limbah cair dari pemerintah/pemerintah daerah.</li><li>3. Limbah cair industri dan kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah.</li></ol> <p>Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Sumber pencemaran udara adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas</p>



**Tabel 2.12**  
**Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo**

No	Aspek Lingkungan	Ringkasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1	Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 sebesar 1224 ton/hari.</li><li>2. Data sampai Tahun 2020, telah terbangun 116 (Seratus Enam Belas) TPST. Dari jumlah 116 TPST yang telah terbangun terdapat 92 TPST yang aktif dan 24 TPST yang tidak aktif</li></ol>	Pertumbuhan permukiman berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan sehingga pelayanan terhadap volume sampah perlu ditingkatkan lagi	Melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan cara 3R
2	Kualitas Air Permukaan/ Badan Air	<ol style="list-style-type: none"><li>1. akibat pencemaran, menurunkan kualitas air, krisis air juga terjadi karena kurangnya ketersediaan air dan terjadinya erosi akibat pembabatan hutan di hulu aliran DAS Brantas serta perubahan pemanfaatan lahan di hulu dan hilir</li><li>2. Disamping itu semburan Lumpur Sidoarjo juga telah menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas air tanah di Kabupaten Sidoarjo karena tercemar oleh lumpur yang tercampur dengan air formasi, sehingga menjadi payau/asin</li></ol>	Kerusakan wilayah pesisir disebabkan oleh aktivitas industri dan aktivitas manusia sehingga untuk menjaga kualitas dan ekosistem di pesisir tetap seimbang, perlunya meningkatkan pelayanan terhadap kawasan pesisir	Pengawasan frekuensi kegiatan prokash di semua sungai yang berlokasi dekat dengan aktivitas industri
3	Kualitas Udara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021, Capaian kinerja dari Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar 99%.</li></ol>	Sumber pencemaran udara paling dominan berasal dari sumber tidak bergerak yaitu industri, karena pertumbuhan kegiatan industri semakin meningkat maka perlu dilakukan peningkatan layanan pencegahan pencemaran udara dengan pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Frekuensi uji emisi/polusi udara karena aktivitas industri perlu ditingkatkan lagi



Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tantangan dan peluang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo kedepan antara lain:

a) Tantangan

1. Semakin berkembangnya jumlah industri, jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian maka berpotensi mencemari lingkungan.
2. Berkembangnya Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan perumahan dan permukiman yang belum dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah juga dapat berpotensi mencemari lingkungan.
3. Terus bertambahnya jumlah penduduk dapat menambah jumlah timbulan sampah.

b) Peluang

1. Semakin banyaknya masyarakat maupun komunitas peduli lingkungan yang menuntut lingkungan hidup yang baik;
2. Bekerjasama dengan dengan pelaku usaha terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang lingkungan hidup

## 2.5 KERJASAMA DAERAH

Pada sub bab ini akan diuraikan terkait rencana pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Sampah. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan sampah dengan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% dan target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% sampai dengan Tahun 2025. Tentunya komitmen ini harus dibarengi dengan kerja dan pengembangan kualitas penanganan sampah di daerah.

Pembangunan dan pengembangan sistem Pengelolaan Sampah yang selama ini telah dilakukan di daerah antara lain melalui pembangunan seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R), diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengelola infrastruktur tersebut sesuai dengan kewenangannya dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Manfaat infrastruktur Pengelolaan Sampah akan terasa bagi masyarakat, bila dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana wewenang sesuai peraturan yang ada. Pemerintah daerah dapat membentuk institusi pengelola yang bertindak sebagai





operator pengelola Pengelolaan Sampah. Bentuk lembaga operator pengelola bergantung pada kondisi dan kesiapan masing-masing daerah. Beberapa lembaga operator yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah, antara lain: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), UPTD yang menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / Perusahaan Daerah.

Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 telah disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati terkait pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di UPT TPA Griyo Mulyo Jabon. Peraturan Bupati Sidoarjo yang telah ditetapkan antara lain :

- (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo ;
- (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo ;
- (3) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo;
- (4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Selain penetapan 3 (Tiga) Peraturan Bupati tersebut , Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengajukan pengusulan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) antara lain :

1. Konsep Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
2. Konsep Peraturan Bupati tentang Tarif Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Griyo Mulyo ;
3. Konsep Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Dan Kemitraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada UPTD TPA Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo





## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada identifikasi permasalahan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat pada Tabel 3.1 yaitu ada 6 (enam) kolom. Kolom pertama yang berisikan tentang aspek kajian yaitu pada aspek-aspek kajian yang telah dilakukan yakni kajian terhadap Renstra K/L atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kajian terhadap OPD Provinsi yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kolom kedua berisikan tentang capaian kinerja OPD. Data capaian kinerja ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Kolom keempat dan kelima berisikan tentang faktor-faktor yang dapat dikendalikan dalam kewenangan OPD dan diluar kewenangan OPD.

Dalam mengidentifikasi permasalahan juga melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dengan adanya tujuan untuk mencapai target kinerja. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Permasalahan yang muncul pada Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- b. Terbatasnya SDM yang memiliki profesional dalam tenaga ahli yang sesuai untuk klasifikasi lingkungan hidup
- c. Kurangnya informasi dilapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk lingkungan hidup dan kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja kurang sesuai
- d. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan penegak hukum bagi pelanggar dalam lingkungan hidup dan kebersihan
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini
- f. Belum optimalnya pengelolaan luas RTH yang dikelola
- g. Operasional TPST yang belum optimal (sarana prasarana dan SDM kurang memadai)



**Tabel 3.1**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(6)
1	Kurangnya daya dukung dan daya tampung beban pencemaran lingkungan pada jumlah pembuangan limbah, pengelolaan persampahan dan diimbangi dengan dukungan luasan RTH di Kabupaten Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di Daerah Aliran Sungai (DAS)</li><li>2. Kurang tegasnya sanksi pada permasalahan lingkungan yang hanya sampai sanksi administratif</li><li>3. Masih rendahnya pengelolaan sampah yang berdasarkan <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i></li><li>4. Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, pandangan masyarakat terhadap TPST masih buruk (TPST masih dipandang menimbulkan polusi bau dan kumuh)</li><li>5. Luas RTH yang terkelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih kurang atau belum sesuai target</li><li>6. Pengelolaan sampah di TPA maupun TPST masih belum sesuai target Jakstrada</li><li>7. Kurang terpeliharanya taman RTH dan media jalan di Kabupaten Sidoarjo</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya informasi lapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja yang kurang sesuai</li><li>2. Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan</li><li>3. Belum sepenuhnya masterplan RTH berjalan secara optimal</li><li>4. Belum optimalnya keanekaragaman hayati</li><li>5. Keterbatasan lahan yang dijadikan RTH</li><li>6. Belum maksimal partisipasi dunia usaha/swasta baik dalam penyediaan lahan untuk RTH maupun saran dan prasarananya</li><li>7. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPST</li><li>8. Belum optimalnya penerapan 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) di masyarakat</li><li>9. Pencurian dan pengrusakan terhadap asset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa pencurian lampu, pengrusakan taman, dan lain-lain</li><li>10. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan taman dan RTH yang menerapkan teknologi yang maju dan ramah lingkungan</li></ol>



### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2026. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”**. Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**.

Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
- d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya



pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 misi yang dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 5 (Lima ) misi tersebut:

**Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.**

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting *good governance*. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

**Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.**

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sektor potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luas khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.



### **Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan**

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis gerbangertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

### **Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.**

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

### **Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.**

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.



Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan melalui Misi 3 (Tiga) diatas yaitu **“Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan”**. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo melakukan 10 (Sepuluh) program antara lain:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
8. Program Pengelolaan Persampahan
9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Permasalahan yang muncul untuk mencapai misi tersebut antara lain terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terbatasnya SDM yang memiliki profesional dalam tenaga ahli yang sesuai untuk klasifikasi lingkungan hidup, kurangnya informasi dilapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk lingkungan hidup dan kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja kurang sesuai, kurangnya koordinasi dan komunikasi kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan penegak hukum bagi pelanggar dalam lingkungan hidup dan kebersihan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini, rendahnya pengelolaan luas RTH yang dilakukan.

Faktor penghambat atau penyebab dari permasalahan pertama yakni kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam penunjang program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah penambahan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan sebagai penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.





Faktor penghambat atau penyebab permasalahan kedua yakni kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam pengawasan dan tindaklanjut kinerja yang tidak dapat menunjang pengendalian permasalahan lingkungan hidup. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut pelatihan SDM dan penambahan SDM profesional dalam tenaga ahli lingkungan hidup.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan ketiga yakni kurangnya fasilitas sistem informasi pengaduan sebagai alat penunjang informasi yang dapat digunakan pantauan pada kawasan Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menjadi selektif dalam kinerja pengawasan serta penampungan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan keempat yakni terjadi kurangnya kejelasan surat rekomendasi dalam pembuangan B3, pembuangan sampah rumah tangga ke TPST, maupun pembuangan air limbah. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan limbah B3, sampah rumah tangga serta pembuangan air limbah.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan kelima yakni kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup yaitu sudut pandang ada TPST masih dipandang menimbulkan pencemaran polusi dari bau dan kumuh. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut menjadikan manajemen pengelolaan TPST menjadi kawasan kelola sampah yang bernilai guna.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan keenam yakni kurangnya penanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam penegelolaan RTH di Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut menggalakkan masterplan RTH yang bisa dimanfaatkan sebagai penambahan luas RTH serta pengelolaan taman yang bersifat tematik ke arah keanekaragaman hayati.





**Tabel 3.2**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</b>			
<b>Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendukung</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlangsungan Lingkungan</b>			
Program Prioritas: Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah (Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dan Program Pengelolaan Persampahan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya informasi lapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja yang kurang sesuai</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini</li> <li>3. Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan</li> <li>4. Belum optimalnya luas RTH yang dikelola</li> <li>5. Belum sepenuhnya masterplan RTH berjalan secara optimal</li> <li>6. Belum optimalnya keanekaragaman hayati</li> <li>7. Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>2. Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam pengawasan dan tindaklanjut kinerja yang tidak dapat menunjang pengendalian permasalahan lingkungan hidup</li> <li>3. Kurangnya fasilitas sistem informasi pengaduan sebagai alat penunjang informasi yang dapat digunakan pantauan pada kawasan yang ada di Kabupaten Sidoarjo</li> <li>4. Kurang pedulinya masyarakat akan lingkungan hidup yaitu sudut pandang adanya TPST masih dipandang menimbulkan pencemaran polusi dari bau dan kumuh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan sebagai penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>2. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai</li> <li>3. Pelatihan SDM dan penambahan SDM profesional dalam tenaga ahli lingkungan hidup</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menjadi lebih selektif dalam kinerja pengawasan serta penampungan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti</li> <li>5. Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan limbah B3, sampah rumah tangga serta pembuangan air limbah</li> </ol>



<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</b>			
<b>Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendukung</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlangsungan Lingkungan</b>			
	<p>8. Operasional TPST yang belum optimal (sarana prasarana dan SDM kurang memadai)</p> <p>9. Masih rendahnya pemenuhan Kawasan RTH Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo</p> <p>10. Kabupaten Sidoarjo belum memiliki dokumen rencana pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati</p>	<p>5. Kurangnya penanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>6. Menggalakkan masterplan RTH yang bisa dimanfaatkan sebagai penambahan luas RTH serta pengelolaan taman yang bersifat tematik kearah keanekaragaman hayati</p>



### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan sasarannya

#### **3.3.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sinergis dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah **“Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”**. Permasalahan yang muncul untuk mencapai misi tersebut antara lain terbatasnya saran dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terbatasnya SDM yang memiliki profesional dalam tenaga ahli yang sesuai untuk klasifikasi lingkungan hidup, kurangnya informasi dilapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk lingkungan hidup dan kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja kurang sesuai, kurangnya koordinasi dan komunikasi kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan penegak hukum bagi pelanggar dalam lingkungan hidup dan kebersihan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini, rendahnya pengelolaan luas RTH yang dikelola.



**Tabel 3.3**  
Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya informasi lapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja yang kurang sesuai</li> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini</li> <li>Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitas Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan</li> <li>Belum optimalnya luas RTH yang dikelola</li> <li>Belum sepenuhnya masterplan RTH berjalan secara optimal</li> <li>Belum optimalnya keanekaragaman hayati</li> <li>Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam pengawasan dan tindak lanjut kinerja yang tidak dapat menunjang pengendalian permasalahan lingkungan hidup</li> <li>Kurang pedulinya masyarakat akan lingkungan hidup yaitu sudut pandang adanya TPST masih dipandang menimbulkan pencemaran polusi dari bau dan kumuh</li> <li>Kurangnya anggaran dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penambahan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan sebagai penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>Pelatihan SDM dan penambahan SDM profesional dalam tenaga ahli lingkungan hidup</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menjadi lebih selektif dalam kinerja pengawasan serta penampungan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti</li> <li>Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan limbah B3, sampah rumah tangga serta pembuangan air limbah</li> <li>Menjadikan manajemen pengelolaan TPST menjadi kawasan kelola sampah yang bernilai guna</li> <li>Menggalakkan masterplan RTH yang bisa dimanfaatkan sebagai penambahan luas RTH serta pengelolaan taman yang bersifat tematik kearah keanekaragaman hayati</li> </ol>

### 3.3.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Jawa Timur selanjutnya yang sinergis dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah **“Meningkatnya kualitas udara ambien perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian)”**. Permasalahan yang muncul untuk mencapai misi tersebut antara lain terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terbatasnya SDM yang memiliki profesional dalam tenaga ahli yang sesuai untuk klasifikasi lingkungan hidup, kurangnya informasi dilapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk lingkungan hidup dan kebersihan yang menyebabkan



indikator kinerja kurang sesuai, rendahnya pengelolaan luas RTH yang dikelola.

Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur selanjutnya yang sinergis dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah **“Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3”**. Permasalahan yang muncul untuk mencapai misi tersebut antara lain kurangnya koordinasi dan komunikasi kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan penegak hukum bagi pelanggar dalam lingkungan hidup dan kebersihan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini.

Sehingga untuk mendorong pencapaian sasaran tersebut perlu menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan pada program yang telah direncanakan didalam renstra dapat terlaksana. Berikut adalah tujuan dan sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, yaitu:

**Tabel 3.4**  
Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terkendalnya Pencemaran air di wilayah sungai (WS), pencemaran udara dan kerusakan lahan	1. Kurangnya informasi lapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja yang kurang sesuai	1. Kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1. Penambahan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan sebagai penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	Meningkatnya kualitas udara ambien perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian)	2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini	2. Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam pengawasan dan tindak lanjut kinerja yang tidak dapat menunjang pengendalian permasalahan lingkungan hidup	2. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai
3	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3	3. Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan	3. Kurang pedulinya masyarakat akan lingkungan hidup yaitu sudut pandang adanya TPST masih dipandang menimbulkan pencemaran polusi dari bau dan kumuh	3. Pelatihan SDM dan penambahan SDM profesional dalam tenaga ahli lingkungan hidup
		4. Belum optimalnya luas RTH yang dikelola		4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menjadi lebih selektif dalam kinerja pengawasan serta penampungan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti
		5. Belum sepenuhnya masterplan RTH berjalan secara optimal		5. Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan limbah B3, sampah rumah tangga serta pembuangan air limbah



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		6. Belum optimalnya keanekaragaman hayati 7. Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST 8. Operasional TPST yang belum optimal (sarana prasarana dan SDM kurang memadai) 9. Masih rendahnya pemenuhan Kawasan RTH Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo 10. Kabupaten Sidoarjo belum memiliki dokumen rencana pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati	4. Kurangnya anggaran dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Sidoarjo	6. Menjadikan manajemen pengelolaan TPST menjadi kawasan kelola sampah yang bernilai guna 7. Menggalakkan masterplan RTH yang bisa dimanfaatkan sebagai penambahan luas RTH serta pengelolaan taman yang bersifat tematik kearah keanekaragaman hayati

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sidoarjo berkembang menjadi wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Arah pengembangan wilayah Jawa Bali (termasuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo) sebagai pusat pengembangan utama sentra pangan nasional, pengembangan sumberdaya alam yang hemat ruang (intensif) terutama perikanan tangkap darat, perkebunan dengan agrotourism, pertambangan migas dan non migas, pengembangan industri pengolahan yang hemat ruang dan air serta ramah lingkungan, pengembangan permukiman yang terkendali, pusat pertumbuhan utama ekonomi dan pintu gerbang utama global dan nasional termasuk pelayanan pemerintahan nasional. Kawasan ekonomi Potensial di Kabupaten Sidoarjo yang diarahkan dalam RTRW Propinsi adalah Kapuk (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi). Berikut merupakan isu strategis terkait RTRW dan KLHS.





**Tabel 3.5**  
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sistem Jaringan Air Bersih	Belum optimalnya penanggulangan beban pencemaran air	Kualitas air sungai Kab. Sidoarjo masih belum memenuhi target penurunan konsentrasi BOD	Meningkatnya koordinasi antar PD/instansi dalam penentuan titik pantau
2	Sistem Persampahan	Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST	Keterbatasan alat sarana dan prasarana transportasi pengangkut sampah	Dukungan anggaran dalam pengadaan Tanah guna pembangunan TPA dan TPST guna meningkatkan pelayanan kebersihan
3	Sistem Jaringan Pematusan/ Drainase	Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan	Kurangnya kesadaran bagi industri yang menyebabkan dalam pembuangan limbah B3	Adanya informasi dari pedoman IKLH terkait penentuan kawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3

**Tabel 3.6**  
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Sampah	Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST	Pertumbuhan permukiman berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan namun sarana prasarana dan SDM dalam pengelolaan sampah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengoptimalan 3R pada TPST dan TPS</li> <li>b. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai</li> <li>c. Penyediaan SDM yang kompeten dalam pengelolaan sampah</li> </ul>





No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Pengelolaan Limbah Tinja dan Limbah Cair Domestik	Kurangnya optimalisasi sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta pembuangan limbah domestik rumah tangga tanpa pengolahan	Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo sehingga menyebabkan pencemaran air dari air limbah domestik semakin meningkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengolahan air limbah domestik rumah tangga dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbahnya ke sungai secara langsung</li> <li>2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan limbah tinja secara berkala</li> <li>3. Kabupaten Sidoarjo telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di Kecamatan Jabon</li> </ol>
3	Kualitas Air Permukaan/ Badan Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menurunkan kualitas air, krisis air juga terjadi karena kurangnya ketersediaan air dan terjadinya erosi akibat pembabatan hutan di hulu serta perubahan pemanfaatan lahan di hulu dan hilir lokasi</li> <li>2. banyaknya sektor industri di Kabupaten Sidoarjo yang berkembang cukup pesat mempengaruhi kualitas air</li> <li>3. semburan Lumpur Sidoarjo juga telah menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas air tanah di Kabupaten Sidoarjo karena tercemar oleh lumpur yang tercampur dengan air formasi, sehingga menjadi payau/asin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerusakan wilayah pesisir disebabkan oleh aktivitas industri dan aktivitas manusia sehingga untuk menjaga kualitas dan ekosistem di pesisir tetap seimbang, perlunya meningkatkan pelayanan terhadap kawasan pesisir</li> <li>2. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas akan menambah kontribusi pencemaran yang signifikan karena pencemaran air badan air sudah terjadi mulai dari hulu</li> <li>3. Banyaknya sumber pencemar yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi (<i>non-point sources</i>) di Kabupaten Sidoarjo, seperti: kegiatan rumah tangga atau pemukiman yang tidak dilengkapi dengan IPAL Komunal, kegiatan pertanian dan peternakan</li> </ol>	Peningkatan pengawasan atau monitoring terhadap aktivitas masyarakat, khususnya yang berada di sepanjang sungai (termasuk terhadap pengelolaan air limbahnya)



No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dikarenakan banyaknya penduduk yang migrasi masuk ke Kabupaten Sidoarjo beriringan dengan peningkatan pertumbuhan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Sidoarjo akan menambah kontribusi pencemaran secara signifikan 5. sistem pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Sidoarjo yang belum optimal		
4	Kualitas Udara	Semakin tingginya pencemaran udara	1. Kemungkinan besar sumber pencemar udara berasal dari aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor yang dapat mempengaruhi kualitas kadar CO di udara ambien 2. Sumber pencemaran udara dominan lainnya berasal dari sumber tidak bergerak yaitu industri, karena pertumbuhan kegiatan industri semakin meningkat	Peningkatan intensitas uji emisi kendaraan bermotor dan monitoring kualitas udara di industri secara optimal

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis faktor pendorong dan faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini isu-isu strategi ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo antara lain:

Isu-Isu Strategis yang terkait:

- Peningkatan pemenuhan baku mutu air pada kualitas air badan air (BOD) dan kualitas udara ambien (SO<sub>2</sub> serta NO<sub>2</sub>)
- Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Belum terselenggaranya keanekaragaman hayati (KEHATI) dan taman tematik pada RTH di Kabupaten Sidoarjo



- d. Belum optimalnya pengelolaan penanganan TPA dan pengurangan sampah di TPST

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
  - b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
6	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
Total		100

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu strategi telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (20)	2 (10)	3 (20)	4 (10)	5 (30)	6 (10)	7
1	Peningkatan pemenuhan baku mutu air pada kualitas air badan air (BOD) dan kualitas udara ambien (SO <sub>2</sub> serta NO <sub>2</sub> )	5	5	5	5	5	4	490



No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (20)	2 (10)	3 (20)	4 (10)	5 (30)	6 (10)	7
2	Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	5	5	5	5	5	4	490
3	Belum terselenggaranya keanekaragaman hayati (KEHATI) dan taman tematik pada RTH di Kabupaten Sidoarjo	5	5	5	5	5	3	480
4	Belum optimalnya pengelolaan penanganan TPA dan pengurangan sampah di TPST	5	5	5	5	5	2	470

**Tabel 3.9**  
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata
1	Peningkatan pemenuhan baku mutu air pada kualitas air badan air (BOD) dan kualitas udara ambien (SO <sub>2</sub> serta NO <sub>2</sub> )	490	81,6
2	Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	490	81,6
3	Belum terselenggaranya keanekaragaman hayati (KEHATI) dan taman tematik pada RTH di Kabupaten Sidoarjo	480	80
4	Belum optimalnya pengelolaan penanganan TPA dan pengurangan sampah di TPST	470	78,3



Maka urutan isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan baku mutu air pada kualitas air badan air (BOD) dan kualitas udara ambien (SO<sub>2</sub> serta NO<sub>2</sub>)
2. Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
3. Belum terselenggaranya keanekaragaman hayati (KEHATI) dan taman tematik pada RTH di Kabupaten Sidoarjo
4. Belum optimalnya pengelolaan penanganan TPA dan pengurangan sampah di TPST

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa untuk menjawab isu strategis terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, perlu memprioritaskan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup perlu adanya peningkatan pemenuhan baku mutu air dan udara dimana merupan peran penting pada lingkungan serta program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Namun isu-isu strategis lainnya tidak bisa diabaikan karena bersinambungan dengan dampak lingkungan hidup dan kebersihan salah satunya yaitu luasan RTH yang bertujuan pad keanekaragaman hayati dan taman tematik hayati yang akan berdaya guna sebagai penyeimbang lingkungan hidup. TPA dan TPST juga merupakan isu strategis yang sangat penting dan merupakan masalah yang susah pada penanganan TPA dan pengurangan TPST dimana sampah harus melalui pengelolaan *reuse*, *reduce*, dan *recycle*.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah “**Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani**”. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah “**Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan**”.

Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (Lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terletak pada Misi 3 (satu) yakni “**Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan**”.

Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap OPD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran OPD.



Berikut dirumuskan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

**“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**

Selain tujuan OPD dirumuskan sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara;
2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo;
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel 4.1 memperlihatkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

**a. Indikator Kinerja Utama**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	51,52	51,53	51,54	51,55	51,56	51,57
			Indeks Kualitas Udara	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19
			Indeks Kualitas Lahan	27,10	27,11	27,12	27,13	27,14	27,15
		Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	Konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD	6,43 mg/L	6,42 mg/L	6,41 mg/L	6,40 mg/L	6,39 mg/L	6,38 mg/L
			Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: a. SO <sub>2</sub> b. NO <sub>2</sub>	a. 7,85 µg/ m <sup>3</sup> b. 13,69 µg/ m <sup>3</sup>	a. 7,84 µg/ m <sup>3</sup> b. 13,68 µg/ m <sup>3</sup>	a. 7,83 µg/ m <sup>3</sup> b. 13,67 µg/ m <sup>3</sup>	a. 7,82 µg/ m <sup>3</sup> b. 13,66 µg/ m <sup>3</sup>	a. 7,81 µg/ m <sup>3</sup> b. 13,65 µg/ m <sup>3</sup>	a. 7,80 µg/ m <sup>3</sup> b. 13,64 µg/ m <sup>3</sup>
		Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase sampah yang terkelola	67 %	71 %	74%	79 %	83%	88 %
			Persentase luasan RTH yang terkelola	5,13 %	5,14 %	5,15 %	5,16 %	5,17 %	5,18 %

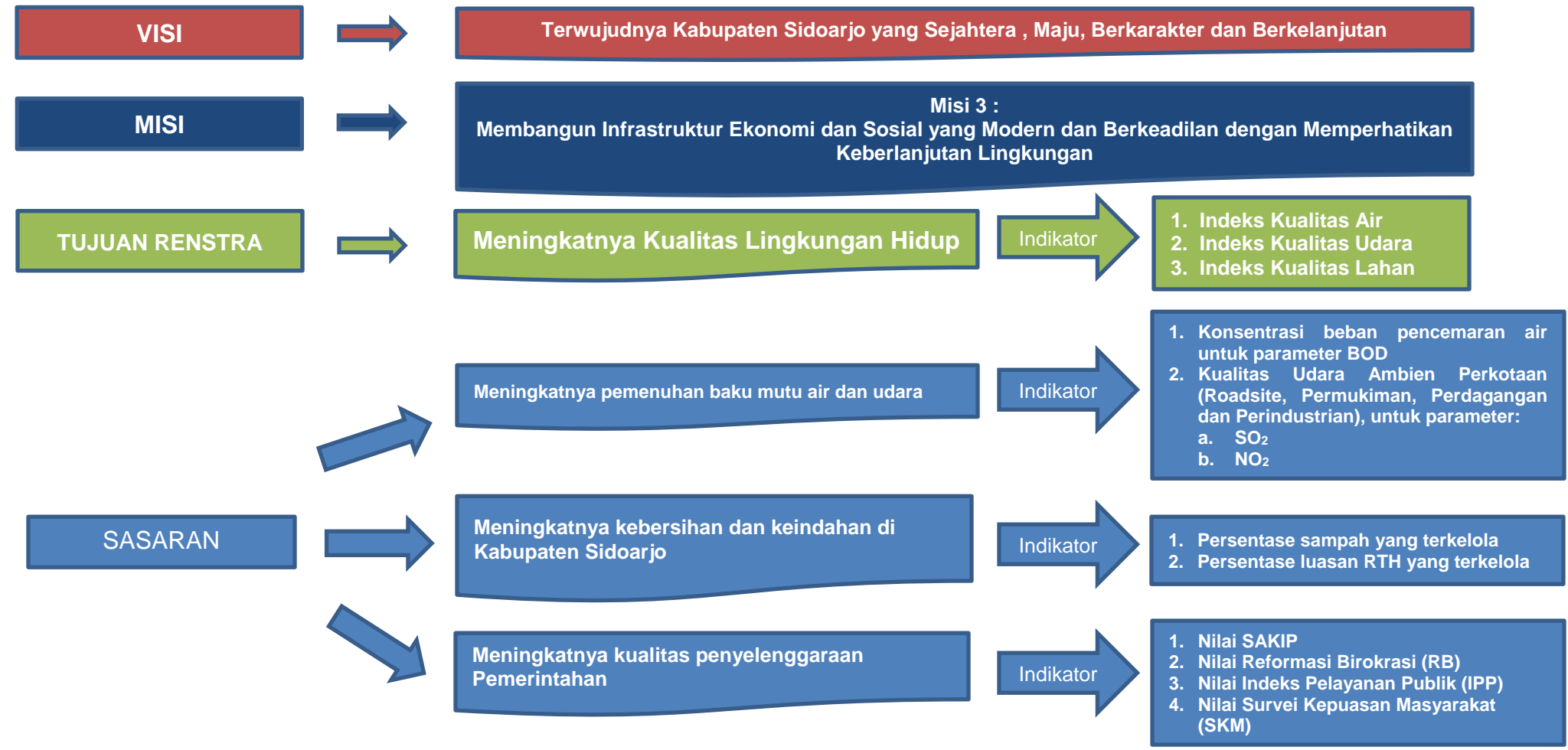


**b. Indikator Kinerja Penunjang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	51,52	51,53	51,54	51,55	51,56	51,57
			Indeks Kualitas Udara	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19
			Indeks Kualitas Lahan	27,10	27,11	27,12	27,13	27,14	27,15
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai SAKIP	A (82,31)	A (83,10)	A (83,2)	A (83,25)	A (83,3)	A (83,35)
			Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	30,58	34,24	34,5	34,75	35	35,25
			Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	B- (3,35)	A- (4,1)	A- (4,11)	A- (4,12)	A- (4,13)	A- (4,14)
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (94,33)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (91)



Berdasarkan tabel 4.1, indikator tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo antara lain Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Dimana ketiga indikator ini juga merupakan indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, artinya kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo berkontribusi secara langsung atas pencapaian indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebelum dilakukan Perubahan Renstra terdapat 4 (Empat) indikator sasaran diantaranya Konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD; Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian) (parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>), Persentase sampah yang terkelola; dan Persentase luasan RTH yang terkelola. Pada Tahun 2022 telah dilakukan Perubahan Renstra, ada penambahan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dengan 4 (Empat) indikator sasaran antara lain : Nilai SAKIP; Nilai Reformasi Birokrasi (RB); Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Selanjutnya pada gambar 4.1 akan dijabarkan cascading atau keterkaitan visi dan misi dalam RPJMD yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo beserta indikator sasaran yang digunakan.



Gambar 4.1  
 Cascading Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2016 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (Aspek Kekuatan dan Aspek Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Aspek Tantangan dan Aspek Ancaman). Sehingga jika berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal dapat dianalisis lebih mendalam untuk kelanjutan sebagai penentu, pengambil, serta penerapan strategi maupun kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam, perwujudan ketersediaan pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan dengan mengutamakan indikator kinerja berupa Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD, Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> serta meningkatnya kebersihan mulai dari sampah yang terkelola dan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal:



**Tabel 5.1**  
Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

<b>Faktor Lingkungan Internal</b>	
<b>1. Kekuatan</b>	
1)	Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2)	Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang
3)	Ketersediaan tenaga lingkungan hidup dan kebersihan pada pengelolaan mutu air dan udara dengan konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD (mg/L), kualitas udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: SO <sub>2</sub> (µg/ Nm <sup>3</sup> ), NO <sub>2</sub> (µg/ Nm <sup>3</sup> ), dan pengelolaan kebersihan serta keindahan dengan sampah yang terkelola dan luas RTH yang pengelolaan RTH dengan keanekaragaman hayati dikelola sebagai taman tematik sebagai pendukung pada penunjang teknis operasional pelayanan publik di lingkungan hidup dan kebersihan
4)	Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari lingkup internal yang disesuaikan dengan alur atau garis komando maupun instruksi kerja yang telah ditetapkan
5)	Tersedianya pelayanan dalam Lingkungan hidup dan kebersihan yang berfungsi sebagai pelayanan pemenuhan baku mutu air dan udara, kebersihan dan keindahan Kabupaten Sidoarjo kepada publik.
<b>2. Kelemahan</b>	
1)	Beberapa tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 menimbulkan overlapping kewenangan terutama di Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pertamanan dan PJU, Bidang Kebersihan
2)	Terbatasnya anggaran dalam mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3)	Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pada pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
4)	Belum optimanya standart pembinaan dan pengawasan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5)	Terbatasnya kualitas SDM tenaga ahli Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berlatar pada pengelolaan baku air dan udara serta sampah yang terkelola dan luas RTH yang dikelola oleh DLHK



### Faktor Lingkungan Eksternal

#### 1) Peluang

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Tuntutan masyarakat akan resposivitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo akan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan di kawasan Kabupaten Sidoarjo
- 3) Tingginya kebutuhan data oleh khalayak publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintah terkait infromasi serta pengaduan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada masyarakat

#### 2. Ancaman

- 1) Kurang taatnya masyarakat akan kepentingan Lingkungan hidup dan kebersihan
- 2) Kurangnya ketegasan dalam regulasi bagi pelanggar Lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Sidoarjo
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan rutin kepentingan menjaga Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 4) Semakin meningkatnya jumlah penduduk, berpotensi meningkatkan jumlah timbulan sampaj
- 5) Tingginya alih fungsi lahan, sehingga membatasi luasan RTH
- 6) Kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang lebih banyak di wilayah pedesaan daripada perkotaan menyebabkan sulitnya pengawasan serta informasi pengaduan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebersihan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, strategi yang dapat diambil diantaranya:

1. Pembangunan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan utilitas ruang publik yang berkualitas
2. Normalisasi sungai-sungai berbasis masyarakat secara berkelanjutan
3. Edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk penanganan bencana, penciptaan dan pemeliharaan kawasan vegetasi untuk meningkatka rasio keterpenuhan RTH
4. Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan keterlibatan peran serta masyarakat.





## **5.2 ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk pengelolaan bau mutu air dan udara, kebersihan serta keindahan Kabupaten Sidoarjo
2. Mengembangkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
3. Mengembangkan pelatihan untuk tenaga ahli dalam spesifikasi lingkungan hidup agar Sumber Daya Manusia yang terbangun pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki skill yang profesional
4. Meningkatkan cepat tanggap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan laporan dan informasi mengenai pengaduan ataupun permasalahan di Lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Sidoarjo
5. Meningkatkan manajemen pengelolaan TPST yang terkelola menjadi lebih baik
6. Mengembangkan luasan RTH yang dikelola agar menjadikan sebagai RTH keanekaragaman hayati yang berkonsep sebagai taman tematik.



**Tabel 5.2**  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</b>			
<b>MISI 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Pemenuhan Baku Mutu Air dan Udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pengoptimalisasi pemenuhan baku mutu air dan udara secara berkelanjutan</li> <li>2. Edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk penanganan bencana, penciptaan dan pemeliharaan kawasan vegetasi untuk meningkatkan rasio keterpenuhan RTH.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk pengelolaan baku mutu air dan udara, kebersihan serta keindahan Kabupaten Sidoarjo</li> <li>2. Mengembangkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo</li> <li>3. Mengembangkan pelatihan untuk tenaga ahli dalam spesifikasi lingkungan hidup agar SDM yang terbangun pada DLHK memiliki skill yang profesional</li> <li>4. Meningkatkan cepat tanggap DLHK akan laporan dan informasi mengenai pengaduan ataupun permasalahan di Lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>



**VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan**

**MISI 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan utilitas ruang publik yang berkualitas</li> <li>2. Edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk penanganan bencana, penciptaan dan pemeliharaan kawasan vegetasi untuk meningkatkan rasio keterpenuhan RTH</li> <li>3. Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan manajemen pengelolaan TPST yang terkelola menjadi lebih baik</li> <li>2. Mengembangkan luasan RTH yang dikelola agar menjadikan sebagai RTH keanekaragaman hayati yang berkonsep sebagai taman tematik</li> </ol>
<b>INDIKATOR KINERJA PENUNJANG</b>			
	3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (SAKIP)</li> <li>2. Peningkatan penerapan Reformasi Birokrasi (RB)</li> <li>3. Peningkatan pelayanan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal</li> <li>2. Menyusun, implementasi serta evaluasi program kerja Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan publik dengan penambahan sarana prasarana pelayanan, respon pengaduan yang cepat</li> </ol>

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dilaksanakan program perangkat daerah. Program tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih dari kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan.



**Tabel 5.3**  
Keterkaitan Tujuan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Lahan	1. Meningkatkan pemenuhan baku mutu air dan udara	1.1 Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD 1.2 Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: a. SO <sub>2</sub> b. NO <sub>2</sub>	1. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota b. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota c. Pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota 2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) a. Penyimpanan sementara limbah B3 b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota



No	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<ul style="list-style-type: none"><li>3. Program perencanaan lingkungan hidup<ul style="list-style-type: none"><li>a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</li><li>b. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</li></ul></li><li>4. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten Sidoarjo</li></ul></li><li>5. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li></ul></li><li>6. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</li></ul>



No	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p>a. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>7. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</p> <p>a. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</p>



No	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	2.1 Persentase sampah yang terkelola 2.2 Persentase luasan RTH yang terkelola	8. Program pengelolaan persampahan a. Pengelolaan Sampah b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh Swasta c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta 9. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) a. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota





No	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>INDIKATOR KINERJA PENUNJANG</b>						
				3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	3.1 Nilai SAKIP 3.2 Nilai Reformasi Birokrasi (RB) 3.3 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 3.4 Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah h. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah i. Peningkatan Pelayanan BLUD



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dalam Dokumen RPJMD, DLHK mempunyai program prioritas yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab, berikut keterkaitan program prioritas kepada DLHK:

1. Program Prioritas: Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah, dengan program:
  - a. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
  - b. Program Pengelolaan Persampahan

Pada program prioritas tersebut telah tercemin dan sesuai dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi :

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, terdiri dari kegiatan:
  - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
    - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
    - 3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



- b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
  - c. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) terdiri dari kegiatan:
- a. Penyimpanan sementara limbah B3, dengan sub kegiatan:
    - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - 2) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
  - b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
3. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP terdiri dari kegiatan:
- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota
  - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD
4. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP terdiri dari kegiatan:



- a. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten Sidoarjo, dengan sub kegiatan:
  - 1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
  
5. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT terdiri dari kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
    - 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
  
6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT terdiri dari kegiatan:
  - a. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  
7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) terdiri dari kegiatan :
  - a. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  
8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN terdiri dari kegiatan :
  - a. Pengelolaan sampah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota



- 2) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
  - 3) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  - 4) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
  - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
  - 6) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
  - 7) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) terdiri dari kegiatan :
- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
    - 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    - 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
    - 4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdiri dari kegiatan :
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:



- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 6) Penyediaan Bahan/Material
  - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pengadaan Mebel
  - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:



- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- h. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- i. Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022 terlihat pada Tabel 6.1. sedangkan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2026 terlihat pada Tabel 6.2.





Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	53,64%	42%	Rp 2.339.086.993	43%	Rp 4.185.133.091
		Indeks Kualitas Udara		Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadside, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: a. SO <sub>2</sub> b. NO <sub>2</sub>		b. Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub>	66,67%	45%	45%		
		Indeks Kualitas Lahan			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	a. Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	-	80%	Rp 2.339.086.993	80%	Rp 4.185.133.091
					b. Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	79,3%	80%		81%		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah informasi kualitas lingkungan yang tersedia	554 Data	230 Data	Rp 1.008.487.500	258 Data	Rp 2.621.920.345	
					Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD	59 Pemantauan	48 pemantauan		30 Pemantauan		
					Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub>	96 Pemantauan	68 pemantauan		50 Pemantauan		
				Jumlah Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	-	90 persetujuan teknis		95 Persetujuan Teknis			



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah laporan pelaksanaan lingkungan dokumen	400 Laporan	430 laporan		440 Laporan	
						Jumlah Dokumen DIKPLHD Kabupaten Sidoarjo yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		-	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Profil Gas Rumah Kaca (GRK) yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -
						Jumlah kegiatan penanganan dampak GRK yang dilaksanakan	-	-		-	
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi dan pembinaan terkait pengelolaan lingkungan hidup	-	-		-	
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter layanan uji lab yang terakreditasi	12 Parameter	14 Parameter	Rp 1.330.599.493	16 Parameter	Rp 1.563.212.746
						Kategori nilai SKM terhadap layanan uji lab	BAIK	BAIK		BAIK	
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang diselesaikan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengisolasian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	-	-	Rp -	-	Rp -



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	-	-	Rp -	-	Rp -
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	-	-	Rp -	-	Rp -
					<b>2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan</b>	-	100%	Rp 1.806.906.400	100%	Rp 162.944.366
					Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah surat rincian teknis Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/ disetujui	-	85 rincian teknis	Rp 100.806.400	160 Rincian Teknis	Rp 162.944.366
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang terfasilitasi dalam melakukan asistensi rincian teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3	-	108 usaha dan atau kegiatan	Rp 100.806.400	185 usaha dan atau kegiatan	Rp 162.944.366
					Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan verifikasi permohonan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten) yang diterbitkan	-	100 %	Rp 1.706.100.000	-	Rp -
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten) yang difasilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ Penimbunan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan	-	1 Laporan	Rp 1.706.100.000	-	Rp -
					<b>3. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	-	100%	Rp 265.985.728	-	Rp -
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian dan pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten yang disusun	-	1 Dokumen	Rp 265.985.728	-	Rp -
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD / RPJMD yang disusun	-	1 Dokumen	Rp 265.985.728	-	Rp -
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak / Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					<b>4. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	Rp 152.704.773	100%	Rp 307.864.295
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	Rp 152.704.773	100%	Rp 307.864.295
					Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	100%	Rp 152.704.773	100%	Rp 307.864.295
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan / atau penyidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan sesuai SOP	-	-	Rp -	-	Rp -



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					5. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	a) Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup	-	1%	Rp 377.290.640	1%	Rp 404.791.000
						b) Persentase sekolah peduli lingkungan hidup	-	0,8%		0,8%	
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	2,5%	1,7%	Rp 377.290.640	5,5%	Rp 404.791.000
					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi / bintek / penyuluhan / workshop / terkait pengelolaan lingkungan hidup	300 peserta	527 peserta	Rp 377.290.640	300 Peserta	Rp 404.791.000
					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah desa yang dibina menjadi desa berseri	-	-	Rp -	-	Rp -
				Jumlah sekolah yang dibina menjadi sekolah adiwiyata		-	-		-		
				Jumlah organisasi / lembaga peduli lingkungan hidup		-	-		-		
					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan / pokmas yang menerima penghargaan lingkungan hidup	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah sekolah yang menerima penghargaan menjadi sekolah adiwiyata	-	-	Rp -	-	Rp -
						b. Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diberi penghargaan SKPL/Green Industry	-	-		-	
					Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti penilaian sekolah adiwiyata	-	-	Rp -	-	Rp -
						Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti penilaian SKPL/Green Industry	-	-		-	



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	a. Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	2,98%	3 %	Rp 166.345.127	3,30%	Rp 229.175.200
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkungan hidup	93,3%	99 %	Rp 166.345.127	93,6%	Rp 229.175.200
						b. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,3%	0,03%		0,5%	
					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang terfasilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	84 Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	111 pengawasan	Rp 166.345.127	100 pengawasan	Rp 229.175.200
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	-	-	Rp -	-	Rp -
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	-	-	Rp -	-	Rp -
		Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo		Persentase sampah yang terkelola	8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a) Persentase penanganan sampah di TPA	43%	43%	Rp 32.170.062.892	47%	Rp 38.709.819.951
			Persentase luasan RTH yang terkelola	b) Persentase pengurangan sampah di TPST		28%	28%	28%			
					Pengelolaan Sampah	Jumlah berat sampah yang dikelola	821 ton / hari	850 ton / hari	Rp 32.170.062.892	990 ton / hari	Rp 38.709.819.951
					Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pengelolaan sampah yang dihasilkan	-	-	Rp -	-	Rp -



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah pengurangan sampah yang dilaksanakan di TPST	307 ton/ hari	310 ton/ hari	Rp 1.684.064.400	315 ton/ hari	Rp 1.687.292.400
						Jumlah sosialisasi terkait pengurangan sampah	12 kegiatan	12 kegiatan		12 kegiatan	
					Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang masuk di TPA	514 ton/ hari	535 ton/hari	Rp 26.182.926.017	550 Ton/ hari	Rp 24.683.169.511
						Ruas Jalan Kabupaten yang bersih	274 ruas jalan	240 ruas jalan		-	
						Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah	773.098 Jiwa	700000 Jiwa		925000 Jiwa	
					Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta sosialisasi / bintek / penyuluhan / workshop terkait pengelolaan persampahan	100 peserta	100 peserta	Rp 150.000.000	-	Rp 15.000.000
						Jumlah perolehan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan	5.000.000.000	5.500.120.000		5.750.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	4 kegiatan	4 kegiatan	Rp 50.000.000	4 Kegiatan	Rp 125.000.000
					Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan	-	3 unit	Rp 4.103.072.475	1 unit	Rp 12.199.358.040
						Jumlah sarpras angkutan sampah yang dipelihara	114 unit	114 unit		113 unit	
						Jumlah sarpras TPA yang diadakan	17 Jenis	3 Jenis		3 Jenis	
						Jumlah sarpras TPA yang dipelihara	4 Jenis	3 Jenis		3 Jenis	
					Penerbitan Izin Pendaaurulan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah izin pendaaurulan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta yang diterbitkan	-	-	Rp	-	Rp -





RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta yang diterbitkan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	-	-	Rp -	-	Rp -
					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen penilaian kinerja pengelolaan sampah yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	-	-	Rp -	-	Rp -
					<b>9. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase luasan RTH yang terkelola</b>	<b>2,17%</b>	<b>2,17%</b>	<b>Rp 12.775.005.824</b>	<b>2,28%</b>	<b>Rp 28.596.753.605</b>
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pentahapan pembangunan taman tematik kehati	-	-	Rp 12.775.005.824	1 dokumen	Rp 28.596.753.605
						Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola	56 %	56 %		61 %	
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Taman Aktif	-	-	Rp -	21 RTH	Rp 24.249.079.720
						Luas RTH yang dikelola	-	-		28 Ha	
						Persentase pengaduan terkait penebangan / perampangan / pengeprasan pohon yang ditindaklanjuti	-	-		100%	
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman tematik yang dikelola	-	-	Rp -	-	Rp 201.359.550
						Jumlah jenis tanaman yang dipelihara	-	-		75 Jenis	



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis / sosialisasi terkait pengelolaan keanekaragaman hayati	-	-	Rp 7.523.544.750	120 Peserta	Rp 111.300.000
						Persentase pengaduan terkait penebangan/ perampangan / pengeprasan yang ditindaklanjuti	-	100 %		-	
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sapras yang berfungsi dengan baik	10 Jenis	10 Jenis	Rp 5.251.461.074	217 Unit	Rp 4.035.014.335
						Luas RTH yang dikelola	26,58 Ha	28 Ha		-	
						Jumlah jenis tanaman yang dipelihara	75 jenis	75 Jenis		-	
<b>INDIKATOR KINERJA PENUNJANG</b>											
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan		1. Nilai SAKIP Daerah 2. Nilai Indeks Birokrasi (RB) 3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 5. Persentase penyerapan Anggaran	10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	84%	86%	Rp 33.784.334.553	85%	Rp 35.196.799.724
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 194.302.600	1 Laporan	Rp 118.537.600
						2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 92.205.000	3 Dokumen	Rp 57.240.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	-	-	Rp -	-	Rp -
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	-	-	Rp -	-	Rp -
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	-	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 9.960.000
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	-	-	Rp -	-	Rp -



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	-	-	Rp -	-	Rp -
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 102.097.600	3 Dokumen	Rp 51.337.600
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	78%	80%	Rp 28.875.738.943	81%	Rp 30.330.273.992
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	283 Pegawai	279 Pegawai	Rp 28.875.738.943	264 Pegawai	Rp 30.330.273.992
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	-	Rp -	Rp -	-	Rp -
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah penatausahaan akuntansi keuangan PD yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan hasil pemeriksaan yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	-	-	Rp -	-	Rp -
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87 Poin	87 Poin	Rp 847.895.900	87 Poin	Rp 995.032.131
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	8 Jenis	7 Jenis	Rp 16.502.267	7 Jenis	Rp 10.655.238
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 Jenis	36 Jenis	Rp 153.918.724	33 Jenis	Rp 55.937.210
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	8 Unit	8 Unit	Rp 207.000.000	20000 liter	Rp 286.000.000
						Jumlah logistik rumah tangga yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	Rp -	1 Jenis	Rp -



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis	Rp 77.964.579	7 Jenis	Rp 40.916.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	Rp 5.613.443	4 Jenis	Rp 6.975.000
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	-	25 Jenis	Rp 53.490.831	25 Jenis	Rp 42.182.349
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat / tamu yang disediakan	188 Kotak	300 Kotak	Rp 5.775.000	800 Kotak	Rp 22.600.000
						Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	-	4 Kunjungan		4 Kunjungan	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang diindaklanjuti	100%	100%	Rp 327.631.056	100 %	Rp 529.766.334
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	-	235 Kali		270 Kali	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	-	-	Rp -	-	Rp -
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data dan informasi PD yang tersedia	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	-	10 Jenis	Rp 967.843.910	3 Jenis	Rp 410.891.861
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	-	1 Unit	Rp 472.468.000	-	Rp -
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan	-	-	Rp -	2 Jenis	Rp 128.173.684
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	-	9 Jenis	Rp 495.375.910	15 Jenis	Rp 282.718.177
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	100%	Rp 2.294.803.200	100%	Rp 2.337.663.200
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	Rp 531.000.000	12 Bulan	Rp 611.000.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	12 Orang	12 Orang	Rp 1.763.803.200	12 Orang	Rp 1.726.663.200
				Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar		13 Orang	13 Orang	13 Orang			
				Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar		25 Orang	26 Orang	24 Orang			
				Jumlah tenaga non ASN yang terbayar		28 Orang	28 Orang	28 Orang			



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	-	6 Jenis	Rp 553.750.000	7 jenis	Rp 1.004.400.940
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	8 Unit	Rp 95.000.000	8 Unit	Rp 185.000.000
				Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia		-	2 Jenis		2 Jenis		
				Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		-	45 Unit		75 Unit		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara	-	-	Rp -	-	Rp -
				Jumlah Alat Besar yang diurus perijinannya		-	-		-		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara	-	-	Rp -	-	Rp -
				Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diurus perijinannya		-	-	Rp -	-	Rp -	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	4 Jenis	Rp 73.000.000	7 Jenis	Rp 153.000.000
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	-	-	-	-	Rp -
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	-	1200 m2	Rp 385.750.000	1200 m2	Rp 666.400.940
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin	-	-	Rp -	-	Rp -
						2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	-	-	Rp -	-	Rp -
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -
						Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	-	-	Rp -	-	Rp -
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	-	-	Rp -	-	Rp -
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah registrasi	-	100%	Rp 50.000.000	-	Rp -
						2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -





**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output / subkegiatan (output))	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2021		Tahun 2022	
								Target	Rp	Target	Rp
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang telah teregistrasi	-	-	Rp -	-	Rp -
						Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi	-	-	-	-	-
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD SKPD yang dilakukan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	4 Kali	4 Kali	Rp 50.000.000	-	Rp -
						Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	-	-	Rp -	-	Rp -
						Jumlah BMD SKPD yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi retribusi perangkat daerah terhadap target yang telah ditetapkan	-	-	Rp -	-	Rp -
					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	Rp -	-	Rp -
					Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	-	Rp -	-	Rp -
					Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	-	-	Rp -	-	Rp -
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	Rp -	-	Rp -



Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026		
						Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip perkembangan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	6,43	6,43	6,42	6,41	6,4	6,39	6,38	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a) Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	45%	Rp 2.158.479.279	47%	Rp 5.174.361.094	49%	Rp 5.717.931.203	51%	Rp 6.290.987.983	
				Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: a. SO <sub>2</sub> b. NO <sub>2</sub>	a. 7,85 b. 13,69	a. 7,85 b. 13,69	a. 7,84 b. 13,68	a. 7,83 b. 13,67	a. 7,82 b. 13,66	a. 7,81 b. 13,65	a. 7,8 b. 13,64		b) Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub>	45%		46%		47%		48%		
	Indeks Kualitas Lahan												Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	a. Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	80%	Rp 2.158.479.279	81%	Rp 4.974.361.094	82%	Rp 5.517.931.203	83%	Rp 6.090.987.983
														b. Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	82%		83%		84%		85%	
													Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	240 Dokumen	Rp 1.203.031.116	258 Dokumen	Rp 2.074.361.094	258 Dokumen	Rp 2.417.931.203	258 Dokumen	Rp 2.790.987.983





**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
												Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	-	-	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000
												2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan	100%	Rp 135.619.200	100%	Rp 257.336.992	100%	Rp 283.070.691	100%	Rp 311.377.760
												Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah surat rincian teknis Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/disetujui	120 Rincian Teknis	Rp 135.619.200	125 Rincian Teknis	Rp 157.336.992	130 Rincian Teknis	Rp 183.070.691	135 Rincian Teknis	Rp 211.377.760
													Persentase arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan	75 %		75%		75%		75%	



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
												Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Perseetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	130 Dokumen	Rp 135.619.200	135 Dokumen	Rp 157.336.992	140 Dokumen	Rp 183.070.691	145 Dokumen	Rp 211.377.760
												Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
												Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten) yang diterbitkan	-	-	100 %	Rp 100.000.000	100 %	Rp 100.000.000	100 %	Rp 100.000.000
												Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Perseetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
														-	-	1 Dokumen	Rp 50.000. 000	1 Dokumen	Rp 50.000. 000	1 Dokumen	Rp 50.000. 000	
													3. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 463.137. 330
													Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten yang disusun	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 100.000.0 00
													Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota Disusun	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 100.000.0 00
													Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten yang disusun	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	2 Dokumen	Rp 363.137. 330
													Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	2 Dokumen	Rp 363.137. 330



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						2021	2022	2023	2024	2025			2026	2023		2024		2025		2026	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
											4. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	Rp 274.49 5.785	100%	Rp 460.00 0.000	100%	Rp 510.000 .000	100%	Rp 565.000.000	
											Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Rp 274.49 5.785	100%	Rp 460.00 0.000	100%	Rp 510.000 .000	100%	Rp 565.000.000	
											Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	35 Dokumen	Rp 274.49 5.785	35 Dokumen	Rp 460.00 0.000	35 Dokumen	Rp 510.000 .000	35 Dokumen	Rp 565.000.000	
											5. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup	1%	Rp 146.54 3.500	1%	Rp 1.205.0 00.000	1%	Rp 1.300.0 00.000	1%	Rp 1.400.000.000	
												Persentase sekolah peduli lingkungan hidup	0,8%		0,8%		0,8%		0,8%		
											Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	4,9%	Rp 146.54 3.500	5%	Rp 1.205.0 00.000	5,1%	Rp 1.300.0 00.000	5,2%	Rp 1.400.000.000	





**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						2021	2022	2023	2024	2025			2026	2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
												Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga /Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	80 Lembaga	Rp 146.543.500	80 Lembaga	Rp 1.150.000.000	80 Lembaga	Rp 1.200.000.000	80 Lembaga	Rp 1.300.000.000
												Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	-	Rp -	320 Peserta	Rp 55.000.000	340 Peserta	Rp 100.000.000	340 Peserta	Rp 100.000.000
												<b>6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase kelembagaan / pokmas yang menerima penghargaan lingkungan hidup	-	Rp -	0,7%	Rp 500.000.000	0,7%	Rp 525.000.000	0,7%	Rp 550.000.000
												Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan menjadi sekolah adiwiyata	-	Rp -	4 sekolah	Rp 500.000.000	5 sekolah	Rp 525.000.000	6 sekolah	Rp 550.000.000
													Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diberi penghargaan SKPL/Green Industry	-	Rp -	5 usaha dan/atau kegiatan		5 usaha dan/atau kegiatan		5 usaha dan/atau kegiatan	
												Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-	Rp -	75 entitas	Rp 500.000.000	75 entitas	Rp 525.000.000	75 entitas	Rp 550.000.000



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
												7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	3,6%	Rp 157.645.200	4,0%	Rp 875.000.000	4,4%	Rp 965.000.000	4,8%	Rp 1.055.000.000	
												Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkungan hidup	90%	Rp 157.645.200	91%	Rp 875.000.000	92%	Rp 965.000.000	93%	Rp 1.055.000.000	
													Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,5%		0,8%		0,8%		1,0		
													Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	70 Laporan	Rp 157.645.200	75 Laporan	Rp 875.000.000	80 Laporan	Rp 965.000.000	85 Laporan	Rp 1.055.000.000



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase sampah yang terkelola	58%	67%	71%	74%	79%	83%	88%	8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah di TPA	50%	Rp 10.597.959.076	53%	Rp 152.522.500.000	56%	Rp 171.287.500.000	59%	Rp 189.602.500.000
			Persentase luasan RTH yang terkelola	5,12 %	5,13 %	5,14 %	5,15 %	5,16 %	5,17 %	5,18 %	Persentase pengurangan sampah di TPST		29%		29%		30%		30%		
												Pengelolaan Sampah	Jumlah berat sampah yang dikelola	950 ton / hari	Rp 10.597.959.076	975 ton / hari	Rp 152.522.500.000	1000 ton / hari	Rp 171.287.500.000	1025 ton / hari	Rp 189.602.500.000
												Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000
												Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4 Laporan	Rp 1.629.849.200	4 Laporan	Rp 2.000.000.000	4 Laporan	Rp 2.200.000.000	4 Laporan	Rp 2.400.000.000
												Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	550 ton/hari	Rp 471.795.699	560 ton/hari	Rp 112.222.500.000	570 ton/hari	Rp 129.887.500.000	580 ton/hari	Rp 147.002.500.000



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
												Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	141 Kelompok	Rp 147.475.000	141 Kelompok	Rp 50.000.000	141 Kelompok	Rp 50.000.000	141 Kelompok	Rp 50.000.000
												Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	Rp 96.826.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000
												Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 100.000.000	-	Rp -	-	Rp -
												Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	76 Unit	Rp 8.202.013.177	78 Unit	Rp 38.000.000.000	79 Unit	Rp 39.000.000.000	80 Unit	Rp 40.000.000.000



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
												9. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH yang dikelola	2,36 %	Rp 38.965.303.618	2,44 %	Rp 16.425.000.000	2,53 %	Rp 17.100.000.000	2,61 %	Rp 17.775.000.000	
												Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pentahapan pembangunan taman tematik kehati	-	Rp 38.965.303.618	-	Rp 16.425.000.000	-	Rp 17.100.000.000	1 Dokumen	Rp 17.775.000.000	
													Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola	56%		56%		61%		61%		
													Lokasi ruas jalan Kabupaten yang bersih	232 Ruas Jalan		232 Ruas Jalan		232 Ruas Jalan		232 Ruas Jalan		
													Jumlah taman aktif yang dipelihara ornamennya	7 Taman Aktif		7 Taman Aktif		7 Taman Aktif		7 Taman Aktif		
													Persentase permohonan perantingan dan penebangan yang tertangani	100 %		100 %		100 %		100 %		
													Persentase layanan data yang disediakan	100%		100%		100%		100%		
													Jumlah lokasi RTH yang dimonitor	12 Titik Lokasi		12 Titik Lokasi		12 Titik Lokasi		12 Titik Lokasi		
													Jumlah RTH Taman Aktif yang dikelola	22 RTH		23 RTH		24 RTH		25 RTH		
													Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati							1 Dokumen	Rp 200.000.000	
													Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Kewenangan Kabupaten/ Kota	29 Ha	Rp 36.083.298.985	29 Ha	Rp 12.625.000.000	30 Ha	Rp 13.050.000.000	30 Ha	Rp 13.375.000.000



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						2021	2022	2023	2024	2025			2026	2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
												Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	120 Orang	Rp 197.325.000	120 Orang	Rp 300.000.000	130 Orang	Rp 350.000.000	140 Orang	Rp 400.000.000
												Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	217 Unit	Rp 2.500.058.938	217 Unit	Rp 3.600.000.000	217 Unit	Rp 3.700.000.000	217 Unit	Rp 3.800.000.000
<b>INDIKATOR KINERJA PENUNJANG</b>																					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A (80,62)	A (82,31)	A (83,10)	A (83,2)	A (83,25)	A (83,3)	A (83,35)	10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	86%	Rp 81.585.463.180	87%	Rp 48.243.500.000	88%	Rp 53.370.500.000	89%	Rp 57.522.500.000	
			Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	N/A	30,58	34,24	34,5	34,75	35	35,25	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	1 Laporan	Rp 74.564.600	1 Laporan	Rp 150.000.000	1 Laporan	Rp 160.000.000	1 Laporan	Rp 170.000.000	
			Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N/A	B-(3,35)	A-(4,1)	A-(4,11)	A-(4,12)	A-(4,13)	A-(4,14)		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	BAIK	Sangat Baik (94,33)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (91)		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		
												Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		
											Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 11.750.000	3 Dokumen	Rp 50.000.000	3 Dokumen	Rp 50.000.000	3 Dokumen	Rp 50.000.000	
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026			
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000
												Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 11.750.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.000.000
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	3 Laporan	Rp 5.000.000	3 Laporan	Rp 5.000.000	3 Laporan	Rp 5.000.000	3 Laporan	Rp 5.000.000
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp 51.064.600	3 Laporan	Rp 70.000.000	3 Laporan	Rp 80.000.000	3 Laporan	Rp 90.000.000	3 Laporan	Rp 90.000.000
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	91 %	Rp 30.329.793.269	91 %	40.025.000.000	91 %	Rp 41.025.000.000	91 %	Rp 43.025.000.000	91 %	Rp 43.025.000.000
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang / bulan	Rp 30.329.793.269	234 Orang / bulan	Rp 40.000.000.000	219 Orang / bulan	Rp 41.000.000.000	205 Orang / bulan	Rp 43.000.000.000	205 Orang / bulan	Rp 43.000.000.000
												Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	14 Dokumen	Rp 5.000.000	14 Dokumen	Rp 5.000.000	14 Dokumen	Rp 5.000.000	14 Dokumen	Rp 5.000.000





**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
														-	-	3300 Dokumen	Rp 5.000.000	3300 Dokumen	Rp 5.000.000	3300 Dokumen	Rp 5.000.000
														-	-	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000
														-	-	2 Dokumen	Rp 5.000.000	2 Dokumen	Rp 5.000.000	2 Dokumen	Rp 5.000.000
														-	-	12 Laporan	Rp 5.000.000	12 Laporan	Rp 5.000.000	12 Laporan	Rp 5.000.000
														90	Rp 784.836.204	90	Rp 855.000.000	91	Rp 960.000.000	91	Rp 1.110.000.000
														5 Paket	Rp 20.862.694	6 Paket	Rp 25.000.000	6 Paket	Rp 25.000.000	6 Paket	Rp 25.000.000
														18 Paket	Rp 24.140.838	22 Paket	Rp 30.000.000	22 Paket	Rp 40.000.000	22 Paket	Rp 45.000.000
														1 Paket	Rp 286.000.000	1 Paket	Rp 300.000.000	1 Paket	Rp 325.000.000	1 Paket	Rp 400.000.000
														6 Paket	Rp 50.450.000	8 Paket	Rp 60.000.000	8 Paket	Rp 65.000.000	8 Paket	Rp 70.000.000



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2023		2024		2025		2026	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	Rp 6.960.000	4 Dokumen	Rp 10.000.000	4 Dokumen	Rp 15.000.000	4 Dokumen	Rp 20.000.000
												Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	15 Paket	Rp 20.439.540	20 Paket	Rp 25.000.000	22 Paket	Rp 30.000.000	24 Paket	Rp 35.000.000
												Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp 2.625.000	4 Laporan	Rp 5.000.000	4 Laporan	Rp 10.000.000	4 Laporan	Rp 15.000.000
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 373.358.132	12 Laporan	Rp 400.000.000	12 Laporan	Rp 450.000.000	12 Laporan	Rp 500.000.000
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	-	Rp -	2 Jenis	Rp 80.000.000	2 Jenis	Rp 90.000.000	2 Jenis	Rp 100.000.000
													Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu	-		90%		90%		90%	
												Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
												Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Rp -	1 Unit	Rp 30.000.000	1 Unit	Rp 35.000.000	1 Unit	Rp 40.000.000
												Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Rp -	4 Unit	Rp 50.000.000	4 Unit	Rp 55.000.000	4 Unit	Rp 60.000.000
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	Rp 2.561.563.200	100%	Rp 2.850.000.000	100%	Rp 3.100.000.000	100%	Rp 3.350.000.000
												Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp 924.000.000	12 Laporan	Rp 1.000.000.000	12 Laporan	Rp 1.050.000.000	12 Laporan	Rp 1.100.000.000



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						2021	2022	2023	2024	2025			2026	2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Rp -	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Rp 1.637.563.200	12 Laporan	Rp 1.800.000.000	12 Laporan	Rp 2.000.000.000	12 Laporan	Rp 2.200.000.000	
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	7 Jenis	Rp 240.000.000	7 Jenis	Rp 500.000.000	7 Jenis	Rp 550.000.000	7 Jenis	Rp 600.000.000	
												Persentase sarana prasarana yang berfungsi baik	70%		70%		70%		70%		
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	Rp 160.000.000	40 Unit	Rp 150.000.000	40 Unit	Rp 175.000.000	40 Unit	Rp 200.000.000	
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	Rp 80.000.000	29 Unit	Rp 100.000.000	29 Unit	Rp 100.000.000	29 Unit	Rp 100.000.000	
											Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	Rp -	1 Unit	Rp 250.000.000	1 Unit	Rp 275.000.000	1 Unit	Rp 300.000.000	
											Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	-	Rp -	90%	Rp 100.000.000	90%	Rp 100.000.000	90%	Rp 100.000.000	
												Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	-		37%		38%		38%		
												Persentase pegawai telah terlayani administrasinya dan mempunyai dokumen SKP	-		100%		100%		100%		



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						2021	2022	2023	2024	2025			2026	2023		2024		2025		2026	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
												Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Rp -	247 Paket	Rp 100.000.000	233 Paket	Rp 100.000.000	218 Paket	Rp 100.000.000
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang telah diamankan	-	-	65%	Rp 15.000.000	70%	Rp 15.000.000	75%	Rp 15.000.000
												Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	2 Dokumen	Rp 5.000.000	2 Dokumen	Rp 5.000.000	2 Dokumen	Rp 5.000.000
												Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000
												Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	4 Laporan	Rp 5.000.000	4 Laporan	Rp 5.000.000	4 Laporan	Rp 5.000.000
												Peningkatan Pelayanan BLUD	Target Pendapatan BLUD	Rp 13.000.000.000	Rp 47.594.705.907	Rp 13.000.500.000	Rp 3.668.500.000	Rp 13.001.000.000	Rp 7.370.500.000	Rp 13.002.000.000	Rp 9.052.500.000
												Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Rp 47.594.705.907	1 Unit Kerja	Rp 3.668.500.000	1 Unit Kerja	Rp 7.370.500.000	1 Unit Kerja	Rp 9.052.500.000



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja OPD yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi.

Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi tugas dari DLHK Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi ketiga yakni **“Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan”**. Dengan Tujuan RPJMD yakni **“Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.”**

Indikator kinerja adalah uraian berupa ringkasan dengan menggunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang untuk pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yaitu

### **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**

Kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada misi dan tujuan RPJMD tertuang dalam Tabel 7.1.

Berdasarkan Tabel 7.1, terdapat penambahan sasaran yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dengan 4 (Empat) Indikator Sasaran yaitu sebagai berikut (1) Nilai SAKIP ; (2) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) ; (3) Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP); dan (4) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



**Tabel 7.1**

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Tujuan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>											
1. Indeks Kualitas Air	Indeks	Perhitungan status mutu air tersebut dilihat dari nilai parameter TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform Air Badan Air pada tahun berjalan	Nilai Indeks Kualitas Air merupakan hasil penjumlahan nilai status mutu air pada tahun berjalan	51,51	51,52	51,53	51,54	51,55	51,56	51,57	51,57
2. Indeks Kualitas Udara	Indeks	Nilai Indeks Kualitas Udara merupakan hasil rerata IEU SO <sub>2</sub> dan IEU NO <sub>2</sub> yang kemudian dikonversikan menjadi Indeks Pencemaran Udara (IPU)	Nilai Indeks Kualitas Udara = $100 - \{50/0,9 \times IPU - 0,1\}$	85,13	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19	85,19
3. Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Luas Tutupan Lahan merupakan Luas yang telah diverifikasi oleh KLHK	Nilai Indeks Kualitas Lahan = $100 - (84,3 - (\text{Tutupan Lahan} \times 100) \times (50 / 54,3))$	27,09	27,10	27,11	27,12	27,13	27,14	27,15	27,15



Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Sasaran 1: Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara</b>											
1. Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	mg/L	Nilai konsentrasi air badan air di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter BOD pada tahun berjalan	Rata-rata konsentrasi Air Badan Air di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter BOD pada tahun berjalan	6,43 mg/L	6,43 mg/L	6,42 mg/L	6,41 mg/L	6,4 mg/L	6,39 mg/L	6,38 mg/L	6,38 mg/L
2. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: a. SO <sub>2</sub> b. NO <sub>2</sub>	µg/ m <sup>3</sup>	Nilai kualitas udara ambien di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> pada tahun berjalan	Rata-rata Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> pada tahun berjalan	a. 7,85 µg/ m <sup>3</sup> b. 13,69 µg/ m <sup>3</sup>	a. 7,85 µg/ m <sup>3</sup> b.13,69 µg/ m <sup>3</sup>	a.7,84 µg/ m <sup>3</sup> b.13,68 µg/ m <sup>3</sup>	a.7,83 µg/ m <sup>3</sup> b.13,67 µg/ m <sup>3</sup>	a.7,82 µg/ m <sup>3</sup> b.13,66 µg/ m <sup>3</sup>	a.7,81 µg/ m <sup>3</sup> b.13,65 µg/ m <sup>3</sup>	a.7,8 µg/ m <sup>3</sup> b.13,64 µg/ m <sup>3</sup>	a.7,8 µg/ m <sup>3</sup> b.13,64 µg/ m <sup>3</sup>





Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Sasaran 2: Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo</b>											
3. Persentase sampah yang terkelola	%	Berat sampah yang terkelola DLHK Sidoarjo yaitu Berat sampah yang terkelola di TPST dan TPA pada tahun berjalan	Persentase sampah yang terkelola = Berat Sampah yang terkelola DLHK Sidoarjo per tahun ----- x 100 % Berat Timbulan Sampah Kabupaten Sidoarjo per tahun	58 %	67 %	71 %	74 %	79 %	83 %	88 %	88 %
4. Persentase luasan RTH yang terkelola	%	Luas Tutupan Lahan (km <sup>2</sup> ) merupakan luasan yang berasal dari perhitungan Indeks Kualitas Lahan	Persentase luasan RTH yang terkelola = Luas Tutupan Lahan (km <sup>2</sup> ) ----- x 100 % Luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo (km <sup>2</sup> )	5,12 %	5,13 %	5,14 %	5,15 %	5,16 %	5,17 %	5,18 %	5,18 %



Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Indikator Kinerja Penunjang</b> <b>Sasaran 3 :</b> <b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan</b>												
1. Nilai SAKIP	Nilai	Dasar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	100% Dari Hasil penilaian = Komponen Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %, Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 %, Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 % dan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25 %	A (80,62)	A (82,31)	A (83,10)	A (83,2)	A (83,25)	A (83,3)	A (83,35)	A (83,35)	



Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	Nilai Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun berjalan	N/A	30,58	34,24	34,5	34,75	35	35,25	35,25
3. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Aspek dan Bobot Penilaian Indeks Pelayanan Publik yaitu : a. Kebijakan Pelayanan dengan bobot 20 % b. Profesionalisme SDM dengan bobot 25 % c. Sarana Prasarana dengan bobot 10 % d. Sistem Informasi Pelayanan Publik dengan bobot 10 % e. Konsultasi dan Pengaduan dengan bobot 25 % f. Inovasi dengan bobot 10 %	N/A	B-(3,35)	A-(4,1)	A-(4,11)	A-(4,12)	A-(4,13)	A-(4,14)	A-(4,14)



Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Website SKM online	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan	Baik	Sangat Baik (94,33)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (91)



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan Lingkungan Hidup untuk periode 5 (Lima) Tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan lingkungan hidup dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian / Lembaga untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sidoarjo.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Lingkungan Hidup dan atau target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo ini.

Sidoarjo, 31 Maret 2023  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

**Dr. M. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701211 199101 1 001